

**PENGARUH KOMPETENSI APARAT DESA DAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP AKUNTABILITAS
PENGELOLAAN DANA DESA PADA DESA-DESA
DI KEC.RAHUNING**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh :

NAMA	: NURSALMAH BR SIAGIAN
NPM	: 1905170080
PROGRAM STUDI	: AKUNTANSI
KONSENTRASI	: SEKTOR PUBLIK

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Rabu, Tanggal 30 Agustus 2023, Pukul 08.30 WIB sampai dengan selesai. Setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang :

MEMUTUSKAN

Nama : NURSALMAH BR SIAGIAN
NPM : 1905170080
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Judul Skripsi : PENGARUH KOMPETENSI APARAT DESA DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA PADA DESA-DESA DI KEC. RAHUNING

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

TIM PENGUJI

PENGUJI I

(Hj. HAFISAH, SE., M.Si)

PENGUJI II

(DIAN LISTRIAWAN, SE., M.Si)



Pembimbing

Unggul | *Novi Fadhila* | Terpercaya

(NOVI FADHILA, SE., MM)

PANITIA UJIAN

Ketua

(Dr. H. JANURI, SE., MM., M.Si)



Sekretaris

(Assoc. Prof. Dr. ADE GUNAWAN, SE., M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : NURSALMAH BR SIAGIAN
N.P.M : 1905170080
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Judul Skripsi : PENGARUH KOMPETENSI APARAT DESA DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA PADA DESA-DESA DI KEC. RAHUNING.

Disetujui dan telah memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, Agustus 2023

Pembimbing Skripsi


(NOVI FADHILA, SE., M.M)

Diketahui/Disetujui

Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU


(Assoc. Prof. Dr. H. ZULIA HANUM, S.E., M.Si.)

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU


(Dr. H. JANURI, S.E., M.M, M.Si)



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Nursalmah Br Siagian
NPM : 1905170080
Dosen Pembimbing : Novi Fadhila, SE., M.M
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Judul Penelitian : Pengaruh Kompetensi Aparat Desa dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Desa-Desa Di Kec. Rahuning.

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	- Sempurnakan pendititan dengan menambahkan pengantar fenomena yang terjadi	29/5, 7/6	f
Bab 2	- gunakan referensi terbaru - gunakan mendeley	7, 13, 14/11 Juni 2023	f
Bab 3	- Sempurnakan definisi operasional - Sempurnakan teknik pengumpulan data dan analisis	17/7	f
Bab 4	- Sempurnakan pembahasan dengan memberi pengantar berupa jurnal/jendititan terdahulu maka pun teori pendukung.	24, 25, 26 juli 2023.	f
Bab 5	- Jangan gunakan kalimat pada kesimpulan	29/juli	f
Daftar Pustaka	- tambah referensi untuk pembatasannya - gunakan mendeley	31/juli	f
Persetujuan Sidang Meja Hijau	Selesai bimbingan	1 Agustus 2023.	f

Medan, Agustus 2023
Dosen Pembimbing

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi


Assoc. Prof. Dr. Hj. ZULIA HANUM, SE, M.Si


NOVI FADHILA, SE., M.M



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nursalmah Br Siagian
NPM : 1905170080
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : **PENGARUH KOMPETENSI APARAT DESA DAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA
PADA DESA-DESA DI KEC. RAHUNING**

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data-data laporan keuangan dalam skripsi dan data-data lainnya adalah benar saya peroleh dari Instansi tersebut

Dan apabila ternyata di kemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil **plagiat** karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, 25 Agustus 2023

Yang membuat pernyataan

NURSALMAH BR SIAGIAN

ABSTRAK

Pengaruh Kompetensi Aparat Desa Dan Sistem Pengendalian Internal

Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Desa-Desa Di

Kec.Rahuning. Nursalmah br Siagian.1905170080

nursalmahsiagian98@gmail.com

Tujuan penelitian untuk mengetahui kompetensi aparat desa, sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Jenis metode yang digunakan metode kuantitatif dengan sampel jenuh dan teknik pengumpulan data menggunakan survey kuesioner. jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 56 responden yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Kaur umum & tata usaha, Kaur Perencanaan, Kasi Pemerintahan, Kasi Kesejahteraan dan Kasi Pelayanan di seluruh Kec. Rahuning. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan uji regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan kompetensi aparat desa terdapat pengaruh secara parsial dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, sistem pengendalian internal tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Secara simultan Kompetensi aparat desa dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

**Kata Kunci: Kompetensi Aparat Desa, Sistem Pengendalian Internal,
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa**

ABSTRACT

The Influence of Village Official Competence and Internal Control Systems on the Accountability of Village Fund Management in Villages in Rahuning District. Nursalmah br Siagian.1905170080
[*nursalmahsiagian98@gmail.com*](mailto:nursalmahsiagian98@gmail.com)

The aim of the research is to determine the competence of village officials, the internal control system influences the accountability of village fund management. The type of method used is a quantitative method with saturated samples and data collection techniques using a questionnaire survey. The number of respondents in this study was 56 respondents consisting of the Village Head, Village Secretary, Head of Finance, Head of General Affairs & Administration, Head of Planning, Head of Government, Head of Welfare and Head of Services in all districts. Rahuning. The data analysis technique in this research uses multiple linear regression tests. The research results show that the competence of village officials has a partial and significant influence on the accountability of village fund management, the internal control system does not have a significant influence on the accountability of village fund management. Simultaneously, the competency of village officials and the internal control system have a positive and significant effect on the accountability of village fund management.

Keywords: Competence of Village Officials, Internal Control System, Accountability for Village Fund Management

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr.Wb.

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini,. Selanjutnya tak lupa pula penulis mengucapkan Shalawat dan Salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa risalahnya kepada seluruh umat manusia dan menjadi suri tauladan bagi kita semua.

Sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan Judul “Pengaruh Kompetensi Aparat Desa Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Desa- Desa Kec. Rahuning ”

Guna memenuhi kelengkapan persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam menyelesaikan laporan Skripsi ini, penulis menyadari bahwa adanya perhatian, dukungan, arahan, serta bimbingan dari berbagai pihak hingga sampai selesainya laporan Skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya teruntuk yang teristimewah yaitu kedua orangtua penulis Ayahanda Hamdan Siagian dan Ibunda Rusmawati yang selalu menyayangi saya, memberikan do'a dan dukungan baik moril maupun materil. Selain itu penulis juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP, Selaku Rektor di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
2. Bapak Dr. H. Januri, SE.,MM.,M.Si, Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
3. Bapak Assoc. Prof. Ade Gunawan ,SE.,M.Si, Selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
4. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung.,SE.,M.Si, Selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
5. Ibu Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, SE.,M.Si, Selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
6. Bapak Riva Ubar Harahap, SE.,AK.,M.S.i.,CA CPA, Selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
7. Ibu Novi Fadhila, SE.,MM, Selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak membimbing penulis, memberikan arahan, ilmu, pemikiran dan waktunya kepada penulis.
8. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Program Akuntansi atas ilmu dan pembekalan yang telah diberikan kepada penulis selama melaksanakan perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
9. Seluruh Staff/Pegawai Biro Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan perihal administrasi

10. Seluruh Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Operator Desa dan Kasi PMK di Kecamatan Rahuning yang telah bersedia bekerjasama dan berpartisipasi dalam penelitian ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik
11. Teman-teman seperjuangan penulis Meilani, Syahvira Indriani, Tri andini dan Defi Purnama yang telah memberikan dukungan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa penulisan Skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu dengan kerendahan hati sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna menyempurnakan Skripsi ini dari semua pihak. Semoga Skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan dan bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ekonomi dan bisnis.

Billahi Fii Sabililhaq Fastabiqul Khairat

Wassalammualaikum Wr.Wb

Medan 2023

Penulis

NURSALMAH BR SIAGIAN
NPM : 1905170080

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFATR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	17
1.3 Rumusan Masalah.....	17
1.4 Tujuan Penelitian.....	17
1.5 Manfaat Penelitian.....	18
BAB II KAJIAN PUSTAKA	20
2.1 Landasan Teori.....	20
2.1.1 Pengelolaan Dana Desa.....	20
2.1.2 Akuntabilitas.....	26
2.1.3 Kompetensi Aparatur Desa.....	31
2.1.4 Sistem Pengendalian Internal.....	34
2.2 Penelitian Terdahulu.....	38
2.3 Kerangka Berpikir.....	39
2.3.1 Pengaruh Kompetensi Aparat Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.....	39
2.3.2 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.....	40
2.3.3 Pengaruh Kompetensi Aparat Desa dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.....	41
2.4 Hipotesis.....	43
BAB III METODE PENELITIAN	44
3.1 Jenis Penelitian.....	44
3.2 Definisi Operasional.....	44
3.2.1 Akuntabilitas Pengelolaan keuangan desa (Y).....	44
3.2.2 Kompetensi Aparatur Desa (X1).....	45
3.2.3 Sistem Pengendalian Internal (X2).....	45
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian.....	47

3.3.1 Tempat Penelitian.....	47
3.3.2 Waktu Penelitian	47
3.4 Populasi dan Sampel	48
3.4.1 Populasi.....	48
3.4.2 Sampel.....	49
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	49
3.6 Teknik Analisis Data.....	50
3.6.1 Uji Kualitas Data.....	50
3.6.2 Statistik Deskriptif	51
3.6.3 Analisis Regresi Linear Berganda.....	51
3.6.4 Uji Asumsi Klasik	52
3.6.4.1. Uji Normalitas	52
3.6.4.2. Uji Multikolonieritas	52
3.6.4.3. Uji Heterokesdastisitas	53
3.6.5 Uji Hipotesis	53
3.6.5.1. Uji T (Parsial).....	53
3.6.5.2. Uji F (Simultan).....	54
3.6.6 Uji Koefisien Determinasi (R^2)	55
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	56
4.1 Deskripsi Data.....	56
4.1.1 Gambaran Umum Objek	56
4.1.2 Demografi Responden.....	57
4.1.3 Distribusi Tanggapan Responden	60
4.2 Uji Kualitas Data.....	72
4.2.1 Uji Validitas	72
4.2.2 Uji Reliabilitas	74
4.3 Analisis Data	75
4.3.1 Statistik Deskriptif	75
4.3.2 Uji Asumsi Klasik	77
4.3.3 Analisis Regresi Linear Berganda.....	81
4.3.4 Uji Hipotesis	82
4.3.4.1. Uji T (Parsial).....	82
4.3.4.2. Uji F (Simultan)	85
4.3.4.3. Uji Koefisien Determinasi (R^2)	86
4.4 Pembahasan.....	87

4.4.1 Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.....	87
4.4.2 Pengaruh Sistem Pengendalian internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.....	89
4.4.3 Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	90
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	92
5.1 Kesimpulan	92
5.2 Saran.....	92
5.3 Keterbatasan.....	93
DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN.....	97

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual	42
Gambar 4. 1 Grafik Histogram.....	78
Gambar 4. 2 Grafik Normail P-Plot	78
Gambar 4. 3 Grafik Heteroskedastisitas.....	80

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Dana Pemasukan Realisasi Anggaran Desa Kecamatan Rahuning	2
Tabel 1. 2 Tingkat Pendidikan Aparatur Desa	7
Tabel 1. 3 Jumlah Desa yang terlambat menyampaikan laporan Desa.....	13
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	38
Tabel 3. 1 Definisi Operasional Variabel.....	46
Tabel 3. 2 Rencana Penyusunan Proposal.....	48
Tabel 3. 3 Daftar Nama Desa di Kecamatan Rahuning	48
Tabel 3. 4 Skor Penilaian Pada Kuesioner	50
Tabel 4. 1 Daftar Nama Desa di Kecamatan Rahuning	58
Tabel 4. 2 Jenis Kelamin Responden	58
Tabel 4. 3 Usia Responden.....	58
Tabel 4. 4 Tingkat Pendidikan Responden	59
Tabel 4. 5 Jabatan Responden	59
Tabel 4. 6 Lama Bekerja Responden	60
Tabel 4. 7 Kriteria Jawaban Responden.....	61
Tabel 4. 8 Skor Angket X1 Kompetensi Aparatur Desa.....	61
Tabel 4. 9 Skor Angket X2 (Sistem Pengendalian Internal).....	63
Tabel 4. 10 Skor Aket Y (Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa)	70
Tabel 4. 11 Validitas Kompetensi Aparatur Desa (X1)	72
Tabel 4. 12 Validitas Sistem Pengendalian Internal (X2).....	73
Tabel 4. 13 Validitas Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)	74
Tabel 4. 14 Hasil Uji Reliabilitas	75
Tabel 4. 15 Statistik Deskriptif	76
Tabel 4. 16 Hasil Multikolonearitas.....	79
Tabel 4. 17 Analisis Regresi Linear Berganda	81
Tabel 4. 18 Hasil Uji T.....	83
Tabel 4. 19 Hasil Uji F.....	86
Tabel 4. 20 Uji Koefisien Determinasi	87

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Undang-Undang (UU) No. 6 Tahun 2014 tentang desa menjadi fokus utama pemerintah Indonesia dalam meningkatkan pembangunan nasional. Pembangunan desa mempunyai peranan penting dalam peningkatan pembangunan nasional dan pembangunan daerah (Rahimah et al., 2018). Pembangunan tersebut ditempuh dengan cara memberikan kewenangan kepada setiap desa untuk mengelola dan menjalankan sistem pemerintahannya sendiri. Wewenang tersebut diberikan dari pusat kepada daerah yang biasa disebut dengan desentralisasi. Kewenangan yang diberikan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan agar menjangkau seluruh lapisan masyarakat Indonesia dan dapat menata desa dengan baik. tentu saja wewenang yang luas tersebut tetap diatur sesuai dengan undang-undang.

Salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan pembangunan desa adalah dengan memberikan dana melalui setiap desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk di kelola oleh masyarakat yang bertujuan untuk memajukan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. Sehingga desa mempunyai kesempatan untuk mengimplementasikan rencana aktivitas pembangunan desa dalam mencapai kesejahteraan warga desa.

Semua itu merupakan suatu langkah dalam pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah yang ada di wilayah masing-masing. Bagi suatu desa implementasi otonomi akan menjadi sebuah kekuatan bagi

pemerintah desa untuk mengatur, mengurus dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. Penyelenggaraan tersebut harus dipertanggungjawabkan. Pertanggung jawaban yang dimaksud diantaranya adalah pertanggung jawaban dalam pengelolaan anggaran atau dana desa.

Untuk melaksanakannya, desa tentunya membutuhkan dana untuk mendukung program-program yang dijalankan oleh desa itu sendiri. Salah satu bentuk bantuan pemerintah pusat adalah dengan dikeluarkannya kebijakan penyediaan keuangan desa kepada masing-masing desa yang diambil dari APBN. Secara nasional, pemerintah telah mengalokasikan anggaran dana desa dengan nilai yang besar untuk sebuah program atau kebijakan yang baru. Salah satu desa tersebut adalah desa- desa yang terdapat di kecamatan Rahuning.

Hal ini terlihat dari data yang diperoleh penulis mengenai penyaluran dana desa yang disalurkan setiap tahunnya ke desa-desa yang terdapat pada Kecamatan Rahuning untuk membantu desa-desa tersebut berkembang baik dalam aspek materi maupun non materi seperti pembangunan, penyuluhan, pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.

Berikut adalah berupa daftar besaran dana desa yang di kelola setiap desa di Kecamatan Rahuning antara lain adalah sebagai berikut :

Tabel 1. 1

Dana Pemasukan Realisasi Anggaran Desa Kecamatan Rahuning

NAMA DESA	TAHUN		
	2019	2020	2021
Perk. Gunung Melayu	1.346.842.000	1.427.503.000	1.369.575.000
Gunung Melayu	725.395.000	739.449.000	752.781.000
Batu Anam	873.759.000	1.044.830.000	1.228.452.000
Perk. Aek Nagaga	740.523.000	749.281.000	969.402.000
Rahuning I	757.346.000	761.859.000	810.490.000
Rahuning II	725.269.000	715.659.000	692.365.000
Rahuning	722.948.000	714.277.000	700.288.000

Sumber : Kasi PMK Kec. Rahuning

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa pada tahun 2019 , tahun 2020 dan tahun 2021 desa - desa pada Kecamatan Rahuning telah menerima anggaran dana desa tiap tahunnya dan tentunya memiliki jumlah yang sangat berbeda-beda tiap tahunnya yang disebabkan oleh adanya perhitungan anggaran dana desa yang didasarkan pada jumlah desa dengan mempertimbangkan jumlah penduduk. Kecamatan Rahuning merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera utara yang terdiri dari 7 desa, yang memperoleh anggaran dana desa dari pemerintah pusat.

Dalam pengelolaan dana desa, pemerintah desa dapat berpedoman kepada Pengaturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa pengelolaan dana desa merupakan adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bagaimana pengelolaan dana desa dapat dilakukan dengan secara transparan, akuntabel, partisipatif dan disiplin. Pemerintah desa harus mampu menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, dimana semua aktivitas penyelenggaraan pemerintahan desa wajib dipertanggungjawabkan pada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan sehingga dapat terwujud tata kelola pemerintahan desa yang baik (*Good Village Governance*).

Mengingat dana yang diterima oleh desa jumlahnya cukup besar dan terus meningkat setiap tahunnya, maka dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pengelolaan keuangan desa dibutuhkan kapasitas aparatur desa yang handal dan sarana lainnya yang memadai agar pelaksanaannya menjadi lebih terarah dan bersifat akuntabilitas (Mualifu et al., 2019). Akuntabilitas merupakan salah satu

prinsip penting yang harus diwujudkan dalam pengelolaan keuangan suatu entitas baik bisnis maupun pemerintahan (Puspa & Prasetyo, 2020). Akuntabilitas dalam pemerintah desa sangat penting karena merupakan salah satu bentuk media pertanggungjawaban pemerintah desa sebagai entitas yang mengelola dana desa (Fadhil, 2020). Menurut Vilmia Faridha (2018) Akuntabilitas merupakan prinsip yang harus ada dalam pemerintahan, baik yang terbesar maupun terkecil yaitu pemerintahan desa. Sebuah pemerintahan dikatakan baik apabila masyarakatnya sejahtera dan tingkat kesejahteraan dilihat dari unit yang paling kecil yaitu desa. Akuntabilitas pemerintahan desa merupakan sebuah tolok ukur kemampuan pemerintah dalam melaksanakan tanggungjawabnya dalam kegiatan pembangunan terkait masalah keuangan yang telah disusun dalam APBDes dan Alokasi Dana Desa merupakan salah satu komponen di dalamnya.

Untuk mendukung keberhasilan akuntabilitas dalam sebuah pemerintahan maka terdapat faktor yang dapat mempengaruhinya. Faktor pertama yaitu Kompetensi Aparat, kompetensi adalah kualitas yang dimiliki seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan untuk melakukan suatu pekerjaan. menurut Nurkhasanah (2019) kompetensi aparatur merupakan kemampuan aparatur dalam mengelola keuangan (memahami peraturan pengelolaan dana desa). Salah satu faktor paling penting dalam sebuah organisasi pemerintahan adalah Sumber Daya Manusia (SDM). (Nurjaya et al., 2021) Tujuan utama dari manajemen sumber daya manusia adalah menyiapkan dan mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, kompetensi sumber daya manusia dianggap memenuhi kriteria jika sumber daya manusia ini dapat mewujudkan tujuan lembaga dengan memberikan pelayanan yang baik dan berkualitas. Tinggi

rendahnya kompetensi yang dimiliki Sumber Daya Manusia (SDM) dalam suatu organisasi atau lembaga pemerintahan, akan menentukan kualitas dari organisasi tersebut. Kompetensi Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 Ayat 10 dijelaskan sebagai kemampuan kerja pada setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standart yang ditetapkan. Tingkatan kompetensi bisa dinilai berdasarkan latar belakang pendidikan yang dimiliki, pelatihan, serta ketrampilan yang dimiliki.

Kompetensi mempunyai pengaruh yang sangat kuat terhadap kinerja pegawai. Menurut (Nurjaya et al., 2021) Sumber daya manusia yang berkualitas dapat dilihat dari latar belakang pendidikan, pelatihan yang pernah diikuti, keterampilan yang dinyatakan dalam pelaksanaan tugas dan deskripsi jabatan.

Kompetensi merupakan kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. peningkatan kompetensi harus terus dilakukan agar setiap pegawai mampu bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya (Suparno, 2014) dalam Andi et, al (2019). Aparat desa yang kompeten juga memahami pentingnya akuntabilitas meningkatkan kinerja.

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dana desa tidak lepas dari kompetensi yang dimilikinya, dengan kompetensi yang kompeten dapat mendorong aparatur desa dalam memahami tata cara pengelolaan dana desa dengan baik. Penelitian Aulia (2018) menyatakan bahwa semakin baik kompetensi aparat pengelola dana desa maka semakin baik pula akuntabilitas

pengelolaannya. Berbeda dengan penelitian Perdana (2018) yang menyatakan bahwa kompetensi aparatur dari pemerintah desa secara signifikan tidak memengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa. Hal tersebut disebabkan karena rendahnya kompetensi maupun tingkat pendidikan yang merupakan ujung tombak pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD).

Fenomena yang terjadi pada kompetensi Aparat desa khususnya di Kecamatan Rahuning menunjukkan bahwa masih terdapat kekurangan sumber daya manusia terkait dengan jenjang pendidikan yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya, misalnya dalam pengelolaan keuangan dana desa yang bukan lulusan pendidikan akuntansi. Menurut (Joanne V Mangindaan et al., 2018) Keterbatasan SDM pemerintah desa menjadi penghambat penyaluran dana desa di sejumlah daerah. Dengan demikian, kualitas SDM sangatlah penting untuk dapat memaksimalkan pengelolaan dana desa yang bersumber dari APBN. Berbagai penelitian yang mengkaji implementasi pengelolaan dana desa menyimpulkan bahwa permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan dana desa pada awalnya terletak pada sumber daya aparatur desa yang menjadi pengelola anggaran tidak disiapkan dengan matang (Sanusi, Paranoan dan Djumlani, 2014; Pratiwi dan Roekhudin, 2016; Putra, Pratiwi dan Suwondo, 2013; Subroto, 2009) Ketidapahaman aparatur pemerintah desa tentang pedoman pengelolaan keuangan desa menjadikan pendidikan dan pelatihan sebagai upaya untuk mengatasi kesulitan dalam menyusun laporan keuangan.

Berikut Taraf Pendidikan Aparatur Desa di Kecamatan Rahuning :

Tabel 1. 2
Tingkat Pendidikan Aparatur Desa

Tingkat Pendidikan			
SMA	SI EKONOMI (AKUNTANSI)	SI LULUSAN LAIN	D3 LULUSAN LAIN
38 Orang	1 Orang	12 Orang	5 Orang

Sumber : Kasi PMK Kecamatan Rahuning

Berdasarkan tabel taraf pendidikan aparatur desa kecamatan Rahuning yang ada di kabupaten Asahan taraf pendidikan yang masih banyak terdapat pegawai yang hanya lulus SMA ini menyebabkan kurangnya fungsi kinerja yang sesuai dengan penempatan pendidikan.

Pengelolaan Dana Desa tidak terlepas dari adanya kompetensi aparat yang dimiliki oleh setiap aparatur desa. dengan kompetensi yang kompeten dapat mendorong aparatur desa dalam memahami tata cara pengelolaan dana desa dengan baik. Apabila mereka gagal dalam memahami hal tersebut, maka akan berdampak pada kesalahan laporan keuangan yang dibuat dan terdapat ketidaksesuaian laporan dengan standar yang telah ditetapkan pemerintah (warisno,2018), Sehingga informasi yang diterima masyarakat nantinya akan menjadi tidak tepat dan tentunya dapat mempengaruhi keputusan yang di ambil selanjutnya. Oleh karena itu, dalam pengelola dana desa yang baik pemerintah desa harus memiliki Kompetensi yang merupakan padanan kata mampu, yaitu dapat melaksanakan pekerjaan atau jabatan yang dipercayakan memahami dengan baik, memiliki terampil dan lain-lain.

Faktor yang tidak kalah pentingnya yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah Sistem Pengendalian Internal, PP No. 60 tahun 2008 menuliskan bahwa sistem pengendalian internal merupakan Proses yang

integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien. Pengendalian internal yang baik sangat dibutuhkan dalam pengelolaan dana desa mengingat dana yang disalurkan cukup signifikan. Oleh karena itu, selain kompetensi yang baik, diperlukan juga sistem yang dapat memberikan keyakinan bahwa penyelenggaraan kegiatan berjalan dengan baik, yang dibuktikan dengan melaporkan laporan keuangan yang handal, untuk memastikan sumber daya keuangan dan mendorong kepatuhan terhadap peraturan yang ditetapkan dan undang-undang agar tujuan dapat tercapai. (Wahyuni et al., 2021) Sistem pengendalian internal yang dikelola dan dijalankan dengan baik akan dapat mempengaruhi sistem pengambilan keputusan pemerintah desa sehingga berimplikasi terhadap akuntabilitas pemerintah desa. Pengendalian internal yang memadai sangat membantu manajemen dalam menjalankan fungsi pengendalian dan mencegah terjadinya kecurangan dan aktivitas lain yang merugikan perusahaan (Zulia Hanum, 2019).

Fenomena sistem pengendalian internal sesuatu hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Kenyataannya di pemerintah aparat desa kecamatan Rahuning di kabupaten Asahan masih memiliki sistem pengendalian intern yang rendah karena belum terbaginya posisi karyawan yang sesuai dengan kemampuan dan masih kurangnya pengendalian yang dilakukan oleh aparatur desa dalam mengawasi kinerja staff desa dan pengelolaan laporan keuangan. Maka diperlukan adanya pengoptimalisasian sumber daya manusia dengan penempatan pegawai yang sesuai dengan kompetensinya. Begitu juga dengan kompetensi yang dimiliki oleh aparatur desa dan karyawan masih rendah hal ini dikarenakan sebagian

karyawan merupakan lulusan SMA, sehingga sering kali terdapat kesulitan yang dirasakan oleh karyawan terutama dalam pengoperasian komputer. Semakin besar kompetensi yang dimiliki oleh seorang aparatur dalam pemerintah desa dan sistem pengendalian dari pihak internal yaitu dimana inspektorat yang kian semakin tinggi maka hal tersebut dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintah desa terhadap publik. Selain itu ketaatan pelaporan keuangan yang disampaikan terkadang mengalami keterlambatan dikarenakan harus menunggu hasil laporan yang dibuat oleh masing masing dusun setempat. uraian permasalahan tersebut merupakan salah satu masuk kedalam indikator sistem pengendalian internal yaitu Lingkungan pengendalian. Untuk itu saat ini perlu dilakukan pelaksanaan sistem pengendalian internal dan akuntabilitas dana desa yang tepat dan efisien. Karena program kerja tidak bisa berjalan optimal tanpa pengendalian intren dan akuntabilitas yang efektif dan efisien, dengan adanya sistem pengendalian internal maka hal-hal yang kurang baik bisa diminimalisir.

Fenomena lainnya tentang pengendalian internal dalam konteks informasi dan komunikasi yang ditemukan oleh peneliti pada seluruh desa di kec. Rahuning yaitu sistem pengendalian intern belum dilaksanakan maksimal hal ini dikarenakan masih belum maksimalnya dalam melakukan pengawasan dan masih sering terjadi ketidaktepatan dalam penyampaian informasi antara kepala desa dan staff desa yang disebabkan karena kurangnya komunikasi. Selain itu ketaatan pelaporan keuangan yang dilakukan oleh kantor kepala desa kec.Rahuning belum berjalan dengan baik karena sering tidak tepat waktu dalam penyusunan laporan keuangan. Dalam pelaksanaannya aparatur lebih menekankan pada sifat sifat yang harus dimiliki oleh aparatur yaitu sifat kejujuran dengan harapan untuk membantu

meningkatkan kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing aparatur desa kec. Rahuning.

Oleh karena itu untuk menjalankan kegiatan dengan baik maka sebuah pemerintahan memerlukan suatu sistem pengendalian intern: Menurut Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyatakan bahwa SPIP memiliki peran penting dalam pengawalan akuntabilitas pengelolaan keuangan baik dari sisi assurance maupun konsultasi. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, yang menyatakan bahwa aparat pengawas intern pemerintah dalam hal ini inspektorat melakukan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP.

Hal ini agar kegiatan dalam pemerintahan mulai dari perencanaan, implementasi, pengawasan, dan tanggung jawab harus dilakukan secara tertib, terkontrol, efisien dan efektif. Sistem pengendalian internal dalam pemerintahan merupakan faktor penting, karena adanya sistem kontrol yang dapat mempengaruhi pemerintah desa dalam

Akuntabilitas memerlukan tindakan pengendalian untuk mencapai kepastian yang cukup tentang efektivitas dan efisiensi pencapaian hasil ekonomi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. penilaian terhadap kinerja merupakan suatu hal yang penting untuk dapat mengetahui sejauh mana tujuan organisasi tersebut berhasil diwujudkan dalam jangka waktu atau periode tertentu. Sehingga apabila desa melaksanakan pengendalian intern dalam proses kerjanya, perangkat desa dapat bertindak sesuai petunjuk dan mengikuti aturan yang telah ditetapkan serta bertanggung jawab atas pelaksanaan hasil ekonomi desa. jika

pengendalian intern tidak berjalan dengan baik, pasti akan menimbulkan ketidaksesuaian dan kebocoran dalam laporan keuangan, yang artinya laporan keuangan masih kurang memiliki kualitas atau nilai informasi yang dapat dipercaya (Tarigan & Sari, 2021).

Penelitian terdahulu yang mengkaji pengaruh SPIP terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa (Fajri, Setyowati, & Siswidiyanto, 2017); (Yudianto & Ekasari, 2017); dan (Widyatama, Lola, & Diarespati, 2017), membuktikan SPIP berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa. Untuk mendukung akuntabilitas, dibutuhkan adanya sistem pengendalian intern yang baik serta dapat dipertanggungjawabkan (Sari, 2017). Memperkuat akuntabilitas sektor publik sebagai konsekuensi penting dari kebijakan pemerintah (Afiah & Azumi, 2015).

Selain kedua faktor diatas, faktor lain yang dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah komitmen organisasi. Komitmen organisasi merupakan bagian penting dari akuntabilitas. perubahan besar dapat terjadi pada akuntabilitas sebuah organisasi melalui komitmen untuk bekerja keras daripada lebih memperhatikan konsisten (Mualifu et al., 2019). Komitmen organisasi pemerintah desa merupakan rasa bertanggung jawab penuh terhadap tugas yang dilakukannya untuk tercapainya tujuan. Nurkhasanah (2019) menyebutkan bahwa dengan adanya komitmen organisasi dalam pemerintahan desa maka sumber daya manusia pada organisasi tersebut dapat berjalan secara maksimal dalam menciptakan akuntabilitas yang baik, komitmen organisasi bisa menjadikan ukuran sejauh mana pemerintah desa memihak organisasinya dan mempertahankan keanggotaannya dalam suatu organisasi. Pemerintah desa yang

memiliki komitmen yang kuat di dalam dirinya dapat mendorong aparatur pemerintah desa untuk bekerja keras dan penuh tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya dan mencapai tujuan yang ditentukan oleh organisasi itu sendiri.

Seseorang yang memiliki komitmen ditandai dengan adanya keyakinan yang kuat terhadap tujuan organisasi, memiliki keinginan untuk tetap berada dalam organisasi, dan bersedia meningkatkan kinerjanya untuk mencapai sasaran organisasi. Berdasarkan definisi tersebut, dalam komitmen organisasi tercakup unsur loyalitas terhadap organisasi, keterlibatan dalam pekerjaan dan menerima terhadap nilai-nilai serta tujuan organisasi. Menurut Harto (2021) dalam (Manik et al., 2020). Komitmen pada organisasi tersebut juga membahas kedekatan karyawan merefleksikan kekuatan keterlibatan dan kesetiaan karyawan pada organisasi dalam meningkatkan peran SDM dalam mencapai kinerja.

Fenomena yang terjadi pada desa kecamatan Rahuning masih adanya keterlambatan dalam penyampaian laporan dana desa kebagian Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan (PMK). yang di sebabkan oleh aparatur desa yang kurang memiliki sikap etos kerja atau komitmen organisasi yang dimiliki aparatur desa sangat kurang. masih ada beberapa desa yang mengalami keterlambatan dalam pencairan dana desa karena banyak yang mengalami hambatan atau kendala dalam pelaporannya antara lain SDM (sumber daya manusia) yang tidak memadai dan terlalu menggantungkan kepada orang yang paham saja sehingga perlu waktu dalam penyelesaian penyusunannya. Menurut PMK Rahuning menyatakan bahwa Komitmen organisasi salah satu faktor mengukur keberhasilan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sehingga hal ini

menyebabkan terlambatnya penyampaian laporan keuangan ke PMK kecamatan Rahuning. Untuk itu, perangkat desa harus memiliki sikap yang terorganisir dan mau melakukan upaya penyelesaian pekerjaan agar pengelolaan keuangan desa berjalan dengan baik. Penelitian untuk memperkuat hal tersebut dilakukan oleh Zulkifli et. al., (2020) menemukan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian Astini (2019); dan Tarjo (2019) juga menyimpulkan bahwa komitmen organisasi berpengaruh signifikan dan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Hal ini bisa terlihat dari adanya data penulis peroleh mengenai beberapa desa yang terlambat dalam menyampaikan laporan Dana Desa pada Kecamatan Rahuning antara lain adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 3

Jumlah Desa yang terlambat menyampaikan laporan Desa

Tanggal	Tahun	Jumlah
Senin, 18 Maret	2019	2 Desa
Selasa, 23 Juni	2020	3 Desa
Jumat, 24 Sep	2021	1 Desa

Sumber : Kasi PMK Kecamatan Rahuning

Berdasarkan Tabel 1.3 diatas dapat dijelaskan bahwa pada tanggal 18 maret tahun 2019 terdapat 2 Desa, pada tanggal 23 Juni tahun 2020 terdapat 3 desa yang terlambat menyampaikan laporan mengenai dana desanya. Dan pada tanggal 24 tahun 2021 masih terdapat 1 desa yang terlambat dalam menyampaikan laporan dana desanya pada pihak Kecamatan Rahuning. Dimana ketentuan dari keterlamabatan penyerahan laporan dana desa yaitu setiap tanggal 15 perbulannya. Ketentuan tersebut juga diperintah oleh naungan kasi PMD kecamatan rahuning.

Dimana menurut Kasi PMK Kecamatan Rahuning keterlambatan dalam penyampaian laporan dana desa ini terjadi dikarenakan aparat desa yang kurang disiplin dalam melaporkan dana desanya. Bahkan menurutnya terdapat beberapa desa yang setiap tahunnya selalu terlambat dalam melaporkan dana desanya. Adapun keterlambatan tersebut dapat diketahui dari penetapan tanggal atau *deadline* yang diberikan Kasi PM. Dengan adanya hal tersebut tentunya tidak dapat dipungkiri, jika terus terjadi keterlambatan dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban mengenai dana desa pada periode berjalan, maka pada periode selanjutnya akan mengalami keterlambatan dalam peluncuran anggaran dana pada desa tersebut sehingga akan mengakibatkan terkendalanya pemerintah desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan mengenai desentralisasi otonomi (Savitri,2019).

Selain itu, faktor terakhir yang dapat mempengaruhi Akuntabilitas pengelolaan dana desa yaitu Penerapan Sistem Keuangan Desa. Penulis menjadikan Penerapan Sistem Keuangan Desa Sebagai variabel yang dapat mempengaruhi akuntabilitas setelah komitmen organisasi. Kementerian Dalam Negeri telah bekerja sama dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan untuk mengembangkan Sistem informasi keuangan desa. BPKP juga berperan terhadap pembinaan SPIP di samping melakukan pengawasan intern. Berkaitan dengan dana desa, BPKP melakukan pengawalan keuangan desa. Hal tersebut sebagai bentuk peran BPKP untuk menjalankan fungsi pembinaan SPIP dan pengawasan pengendalian intern yang bersifat lintas sektoral.pengawalan keuangan desa yang dimaksud meliputi peningkatan Kompetensi SDM Pemda dan desa. Hal ini dilakukan guna membantu pemerintah desa dalam mengelola

keuangan desa sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa serta sebagai penentu kinerja pemerintah di desa (Kiswanto & Fatmawati, 2019). Namun, penggunaan SISKEUDES belum berjalan sepenuhnya. Hal ini dikarenakan operator yang menjalankan sistem keuangan desa sendiri adalah bukan lulusan di bidang ilmu komputer atau ilmu informatika, sehingga operator terkadang sulit dalam menjalankan sistem keuangan desa di setiap desa.

Aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) telah mengakomodir seluruh regulasi terkait dengan keuangan desa, dirancang secara integrasi, user friendly, dan desktop application serta memiliki sistem pengendalian intern yang melekat dan efektif dalam menghasikan informasi keuangan. Aplikasi ini telah diimplementasikan secara perdana di pemerintah kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara tepatnya seluruh desa kecamatan Rahuning pada tanggal 12 Juni 2018. tujuan diterapkannya sistem keuangan desa ini adalah untuk memudahkan pemerintah desa sehingga tepat waktu dalam menyampaikan laporan mengenai keuangan desanya dan berharap setelah adanya siskeudes ini dapat tercapainya asas pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Penerapan sistem keuangan desa tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan bagi penggunaannya. Keunggulan SISKEUDES adalah memudahkan pemerintah desa dalam melakukan pengelolaan keuangan. Aplikasi ini juga dapat digunakan secara online maupun offline dan dilengkapi dengan petunjuk pelaksanaan dan panduan aplikasi untuk menghasilkan laporan keuangan yang lebih akurat. Kelemahan dari aplikasi ini adalah sering ditemui error pada saat proses input, data yang dimasukkan salah atau halaman input tidak ditampilkan.

Penelitian yang dilakukan oleh Sarifudin Mada, Lintje Kalangi, Hendrik Gamaliel (2017) yang berjudul “Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo” Penelitian yang dilaksanakan di Kabupaten Gorontalo dengan 120 responden ini menunjukkan kompetensi aparat pengelola Dana Desa dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa yang artinya semakin kompeten pengelola Dana Desa dan semakin intens partisipasi dari masyarakat maka pengelolaan Dana Desa menjadi semakin akuntabel.

Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis lakukan adalah pada lokasi penelitian serta grand teori yang digunakan, persamaanya yaitu sama-sama meneliti tentang kompetensi aparat dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, perbaikannya yaitu penelitian yang saya lakukan lebih sederhana tanpa menghilangkan setiap makna yang ada dan penelitian ini lebih banyak mengangkat fenomena yang ada dari pada penelitian sebelumnya.

Berdasarkan fenomena – fenomena diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “ **PENGARUH KOMPETENSI APARAT DESA DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA PADA DESA – DESA KEC. RAHUNING.**”

1.2 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Rendahnya kompetensi kemampuan tingkat pendidikan aparat desa
Dan keterbatasan kapasitas sumber daya manusia (SDM) aparatur pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa.
2. Terdapat pengendalian internal yang rendah pada lingkungan pemerintahan desa sehingga kinerja terkait pengelolaan dana desa yang diberikan oleh pemerintahan desa kepada masyarakat menjadi kurang maksimal.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang dijadikan objek penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah kompetensi aparat desa mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Rahuning?
2. Apakah sistem pengendalian internal (SPI) mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Rahuning?
3. Apakah kompetensi aparatur desa dan sistem pengendalian internal mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Rahuning?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari peneltian ini adalah untuk menguji dan menganalisis :

1. Pengaruh kompetensi aparat desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pada Kecamatan Rahuning

2. Pengaruh sistem pengendalian internal (SPI) terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pada Kecamatan Rahuning
3. Pengaruh kompetensi aparat desa dan sistem pengendalian internal terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pada Kecamatan Rahuning

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Penulis

Sebagai sarana dalam menerapkan teori – teori yang telah didapatkan selama memperoleh pendidikan pada saat kuliah ditengah persoalan yang terjadi di masyarakat sekitar terutama dalam bidang akuntansi sektor publik. Khususnya mengenai Kompetensi aparat desa, Komitmen organisasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada Kecamatan Rahuning.

2. Bagi Desa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu informasi yang bermanfaat baik berupa masukan dan dapat dipergunakan menjadi suatu referensi bagi desa khususnya di Kecamatan Rahuning serta dapat memberikan pertimbangan mengenai kompetensi aparat desa, komitmen organisasi dan penerapan sistem keuangan desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada Kecamatan Rahuning.

3. Bagi Peneliti Lain

Sebagai referensi yang dapat memberikan wawasan dan masukan tambahan ilmu pengetahuan dan perbandingan serta diharapkan dapat di gunakan sebagai bahan acuan peneliti selanjutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengelolaan Dana Desa

Menurut (Ifatul et al.,2020) Pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawas keuangan desa.

Pengelolaan yaitu suatu rangkaian tugas yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang demi mencapai tujuan yang diinginkan. Salah satu aspek yang harus dimiliki pemangku kepentingan desa khususnya aparat desa adalah pengetahuan dan pemahaman dalam pengelolaan dana desa. Dalam mengelola dana desa diperlukan mekanisme pengawasan yang bertujuan agar pengelolaan keuangan desa semakin akuntabel. Untuk meningkatkan keefektifan mekanisme pengawasan dan meminimalisir terjadinya pelanggaran, maka akan diberikan sanksi pada pihak yang melaksanakan tugas tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Aspek ini harus dimiliki guna mewujudkan akuntabilitas dan transparansi keuangan desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 mengenai Pengelolaan Dana Desa menyatakan bahwa Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan dari kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan serta pertanggungjawaban keuangan desa. Siklus Pengelolaan Keuangan Desa

berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 mengenai Pengelolaan Dana Desa meliputi :

1. Perencanaan

Suatu proses tindakan untuk mencapai masa depan yang lebih baik, dengan mempertimbangkan keadaan saat ini dan masa lalu. Inti dari perencanaan adalah bagaimana meramalkan masa depan berdasarkan tujuan yang ditetapkan, yaitu. melakukan berbagai persiapan berdasarkan data dan informasi yang tersedia saat ini, sehingga aspek-aspeknya masuk dalam rencana pembangunan, khususnya perencanaan pembangunan wilayah kecamatan dan desa. Dalam kaitannya dengan Pengelolaan Keuangan Desa, perencanaan dimaksud adalah proses penyusunan APBDes.

2. Pelaksanaan

Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 5 Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis Pengelola Keuangan Desa mempunyai tugas antara lain:

- a. Mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APBDesa.
- b. Mengkoordinasikan penyusunan rancangan APBDesa dan rancangan perubahan APBDesa.
- c. Mengkoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.

- d. Mengkoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala desa tentang penjabaran APBDesa dan Perubahan penjabaran APBDesa.
- e. Mengkoordinasikan tugas perangkat desa lain yang menjalankan tugas PPKD ; dan
- f. Mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.

3. Pertanggungjawaban

Menurut (Laelis 2021) Pertanggungjawaban adalah proses dari semua kegiatan pengelolaan keuangan yang berada di bawah tanggung jawab pemerintah. Pertanggungjawaban dana desa berarti pertanggungjawaban pelaksanaannya, penggunaan alokasi dana desa harus jelas dan transparan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Pengelolaan dana desa mengacu pada urutan proses untuk melakukan suatu kegiatan tertentu, dimana urutan proses tersebut terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pemantauan, evaluasi dan pengendalian untuk membantu dan mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan.

2.1.1.1 Asas Pengelolaan Dana Desa

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 2 menyatakan bahwa Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Dengan adanya asas-asas ini diharapkan nantinya pemerintah desa dapat transparan dalam mengelola keuangan desa, akuntabel dalam menyusun

laporan keuangan serta tertib dalam penggunaan anggaran dengan uraian sebagai berikut :

Keuangan Desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dengan uraian sebagai berikut:

- a. Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.
- d. Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

Berdasarkan asas atau prinsip pengelolaan keuangan tersebut perlu dijadikan pedoman dalam mengelola keuangan desa, agar dana tersebut dapat dipergunakan secara efektif, efisien, ekonomis, dan berkeadilan. Secara efektif maksudnya bahwa pengelolaan keuangan desa tersebut harus dapat mencapai tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, secara efisien maksudnya bahwa pengelolaan keuangan yang dimaksud dapat menghasilkan perbandingan terbaik antara masukan dan pengeluarannya. Sedangkan secara ekonomis, maksudnya bahwa pengelolaan keuangan tersebut dapat menghasilkan perbandingan terbaik antara masukan dengan nilai masukan, adapun secara berkeadilan maksudnya bahwa pengelolaan keuangan tersebut dapat memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat. Pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan aktivitas/kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 mengenai desa Pasal 93 pengelolaan keuangan desa yaitu meliputi :

- a. Perencanaan

Perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran Pemerintahan Desa pada tahun anggaran yang dianggarkan dalam APB Desa. Sekretaris Desa

mengkoordinasikan penyusunan APB Desa berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun berkenaan dan pedoman penyusunannya diatur dengan Peraturan Bupati (Perbup) setiap tahun. Rancangan APB Desa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan Peraturan Desa (Perdes) tentang APB Desa.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada Bank yang ditunjuk Bupati. Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran sesuai tugasnya untuk menyusun Dokumen Penyelenggaraan Anggaran (DPA) setelah Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa ditetapkan. DPA tersebut terdiri atas:

- 1) Rencana kegiatan dan Anggaran Desa;
- 2) Rencana kerja kegiatan Desa; dan
- 3) Rencana Anggaran Biaya.

c. Penatausahaan

Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. Penatausahaan dimaksud dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam Buku Kas Umum yang ditutup setiap akhir bulan.

d. Pelaporan

Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati melalui Camat yang terdiri atas:

- 1) Laporan pelaksanaan APB Desa, dan
 - 2) Laporan realisasi kegiatan.
- e. Pertanggungjawaban

Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran.

2.1.2 Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban berupa laporan dengan prinsip bahwa setiap kegiatan pengelolaan keuangan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa. Kinerja sebaiknya harus dilihat dari ukuran eksternal, seperti nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. suatu kegiatan organisasi publik memiliki akuntabilitas yang tinggi jika kegiatan itu dianggap benar dan sesuai dengan nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat.

Menurut (Rismawati, 2019) Akuntabilitas adalah suatu jenis kewajiban seseorang atau organisasi untuk mempertanggung jawabkan setiap tindakan yang telah mereka kuasai kepada badan yang didelegasikan, yang tentunya memiliki kekuasaan dan hak untuk meminta informasi atau pertanggungjawaban. Akuntabilitas diberikan kepada mereka yang memiliki hak untuk bertanggung jawab. Akuntabilitas berupa

laporan dengan prinsip bahwa kegiatan pengelolaan keuangan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa.

Menurut Suci dan Aulia (2019) Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Akuntabilitas merupakan hal yang penting untuk menjamin nilai-nilai efisiensi, efektivitas dan reliabilitas dalam pelaporan keuangan desa yang berisi kegiatan mulai dari perencanaan hingga realisasi atau pelaksanaan (Perdana, 2018) Akuntabilitas untuk mempertanggungjawabkan kepada pengelola sumber daya, serta pelaksana kebijakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Akuntabilitas memberikan jawaban atau pertanggungjawaban setiap keperluan dana desa, dengan cara menjelaskan suatu kinerja atau kegiatan yang telah dilakukan oleh pemerintah desa dalam memperoleh tindakan seseorang badan hukum perusahaan dan mencakup kumpulan organisasi dari setiap pihak yang bersangkutan untuk menghindari kegiatan penyelewangan.

Pertanggungjawaban berupa laporan dengan prinsip bahwa setiap kegiatan pengelolaan keuangan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa“ (Rismawati, 2019)

Tuntunan mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa menjadi fokus terpenting karena akuntabilitas tersebut menunjukkan keberhasilan tercapainya visi dari setiap desa yaitu untuk mewujudkan desa yang maju, kuat, mandiri, demokratis dan berkeadilan mencapai kesejahteraan masyarakat desa.

Hingga akhirnya tuntutan yang kemudian muncul yaitu perlu dibuatnya laporan keuangan eksternal yang dapat menggambarkan kinerja lembaga sektor publik. Dengan itu terwujudnya akuntabilitas pemerintahan yang ada di desa dalam mengelola keuangan desa merupakan salah satu bentuk pelaporan yang menggambarkan kinerja lembaga sektor publik. Maka dari itu akuntabilitas diharapkan dapat menjadikan kualitas pemerintahan baik individu maupun program yang dijalankan yang jauh lebih baik dan transparan kepada masyarakat.

2.1.2.1 Indikator Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Menurut Mahmudi, (2011) dalam Kartika (2020) mengemukakan bahwa indikator dalam mengukur akuntabilitas pengelolaan dana desa terdiri atas :

a. Kejujuran dan keterbukaan informasi

Jujur yaitu apa yang dikatakan seseorang yang berintegritas harus sesuai dengan hati nuraninya dan apa yang dikatakannya sesuai dengan kenyataan yang ada. keterbukaan informasi publik adalah suatu kewajiban pemerintah untuk memberikan akses yang cukup dan mudah bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang diperlukan.

b. Kepatuhan dalam pelaporan

Pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan desa adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan tanggung jawab (pertanggungjawaban) atas tugas dan wewenang yang diberikan.

c. Kesesuaian prosedur

Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan dalam pengelolaan dana desa.

d. Kecukupan informasi

Kecukupan berarti informasi harus cukup dalam jumlah, yaitu misi harus menyediakan laporan berisi informasi yang diperlukan dalam proses untuk pengambilan keputusan.

e. Ketepatan penyampaian informasi

ketepatan waktu (timeliness) merupakan faktor penting dalam penyajian laporan keuangan kepada publik sehingga perusahaan diharapkan untuk tidak menunda penyajian laporan keuangannya agar informasi tersebut tidak kehilangan kemampuannya dalam mempengaruhi pengambilan keputusan. Hal ini merupakan upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dana akuntabilitas.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah sebagai berikut :

a. Kompetensi Aparatur Desa

Kompetensi adalah suatu kemampuan atau kecakapan yang memiliki keterampilan (*skill*), Pengetahuan (*knowledge*), dan kemampuan (*ability*) untuk melaksanakan suatu pekerjaan atau tugas di bidang tertentu, sesuai dengan jabatan yang disandangnya.

b. Sistem Pengendalian Internal

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 “Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan”.

c. Komitmen Organisasi

Komitmen organisasi merupakan sikap atau perilaku yang ditunjukkan seseorang terhadap organisasi yang menunjukkan kesetiaan untuk mencapai visi, misi, nilai dan tujuan organisasi. Komitmen organisasi yaitu salah satu faktor yang harus dimiliki oleh seseorang dalam organisasi guna mewujudkan akuntabilitas yang baik.

d. Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)

Sistem keuangan desa merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam rangka meningkatkan kualitas tata pengelolaan keuangan desa sehingga akuntabilitas dan transparan. Dengan adanya program ini, perangkat desa dapat dengan mudah melakukan pengelolaan keuangan desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan guna memudahkan dalam proses keuangan desa.

2.1.3 Kompetensi Aparatur Desa

(Puspa & Prasetyo, 2020) Kompetensi merupakan faktor internal yang penting untuk dipertimbangkan dalam mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang akuntabel.

Aziz dan Zuhro (2018) menyatakan bahwa kemampuan staf/sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting yang sangat berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Karena laporan keuangan yang berkualitas tidak dapat terealisasi tanpa melibatkan sumber daya manusia.

Sumber daya manusia dimaknai sebagai sumber kekuatan dalam diri manusia, dimana organisasi dapat menggunakannya. Sumber Daya Manusia adalah acuan dalam pembuatan laporan keuangan yang berkualitas karena dalam penyusunan laporan keuangan yaitu mereka yang sudah menguasai Standar Akuntansi Pemerintahan“ (Ningrum, 2018).

Tingkat keterampilan sumber daya manusia (SDM) suatu organisasi atau instansi pemerintah menentukan kualitas organisasi tersebut.

Untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dana desa diperlukan sumber daya manusia yang memadai dan kompeten sehingga tujuan yang ditetapkan dapat tercapai. Sumber daya manusia yang andal di dalam organisasi dibentuk sejak tahap seleksi hingga tahap pelaksanaan tugas karena sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam menjalankan operasional dan untuk kepentingan pengambilan keputusan. Hal tersebut sebagai bentuk tanggung jawab aparatur desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan desa“ (Widiawaty, 2019)

Kompetensi adalah faktor yang bisa mempengaruhi akuntabilitas. Untuk meningkatkan akuntabilitas dibutuhkan adanya kompetensi Kartika, (2020). Kompetensi yang dimiliki aparatur desa juga menjadi tolak ukur dalam pengelolaan dana desa yang baik dan akuntabel sebab aparatur desa yang berkompeten dan memiliki kemampuan dalam mengelola dana desa akan mudah menjalankan tugasnya. Kompetensi aparatur desa mutlak diperlukan agar pengelolaan dana desa untuk pengembangan berbagai aspek dapat dicapai dengan menggunakan kecerdasan, pengetahuan dan keterampilan serta perilaku untuk mendorong pembangunan desa yang optimal. Sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas di bidang pekerjaan tertentu maka ia harus memiliki pengetahuan, keterampilan dan keahlian yang berkaitan dengan pekerjaannya.

Menurut Laksmi dan Sujana (2019) kompetensi SDM adalah kemahiran/keterampilan yang didapati dalam diri manusia untuk menghadapi situasi atau keadaan saat melakukan tanggungjawab pekerjaannya. Kompetensi perangkat desa dapat ditingkatkan dengan mencakup beberapa aspek yaitu kecakapan atas pengetahuan, keterampilan dan wawasan yang didapatkan melalui belajar, latihan, pengalaman serta pendidikan.

Oleh sebab itu, diperlukan kompetensi aparatur, komitmen organisasi yang tinggi untuk membantu kepala desa dalam mengelola dana desa (Larastika Medianti, 2018)

Aparat yang kompeten akan menghasilkan output yang baik yang sesuai dengan prinsip akuntabilitas, hal ini sejalan dengan teori sumber daya manusia yang mengemukakan bahwa sumber daya manusia merupakan daya yang harus ditingkatkan kualitas dan kompetensinya untuk menjadi sebuah kekuatan. Sejalan juga dengan teori stewardship dimana aparat yang bertugas sebagai pelayan memiliki kewajiban untuk melayani sebagai wujud akuntabilitas, sehingga pada saat pengambilan keputusan dalam penggunaan dana desa akan menghasilkan keputusan yang terbaik guna memberikan pelayanan yang terbaik sesuai dengan tugas.

Dari beberapa pendapat diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa kompetensi sangat dibutuhkan oleh seorang pegawai atau aparatur desa. Dengan adanya kompetensi dapat meningkatkan kualitas dirinya sehingga dapat menghasilkan kinerja yang maksimal. Seorang pegawai yang tidak

memiliki kompetensi akan melakukan pekerjaan lebih lama dan tidak sesuai dengan tujuan.

2.1.3.1 Indikator Kompetensi Aparatur Desa

Indikator Kompetensi Aparatur Desa Menurut Suryani, N.M., & Suprasto (2011) dalam Ni Made Suryani Herkulanus (2021) menyatakan bahwa indikator dalam mengukur Kompetensi Aparatur Desa terdiri atas :

a. Pengetahuan (*knowledge*)

Informasi yang dimiliki oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan bidang tertentu

b. Prilaku (*attitude*)

Tingkah laku seseorang atau pegawai dalam melaksanakan tugasnya dan bertanggungjawab sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan oleh perusahaan.

c. Keahlian (*skill*)

kemampuan mengerjakan tugas fisik atau mental tertentu. dapat dilihat dari keterampilan teknik, administratif dan hubungan manusia.

2.1.4 Sistem Pengendalian Internal

Pemerintah telah memberlakukan banyak bentuk sistem, semuanya dengan tujuan mencapai tata pemerintahan yang baik. Kegiatan penyelenggaraan pemerintahan tentu memiliki kegiatan yang cukup banyak dan sangat luas, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban,

pengawasan hingga evaluasi. Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah membentuk suatu sistem yang dapat mengendalikan seluruh kegiatan penyelenggaraan pemerintahan.

Agar tercapai akuntabilitas yang baik dalam penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan pemerintah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pembuatan laporan serta pertanggungjawaban harus dilakukan secara tertib, terkendali, efektif dan efisien. Oleh karena itu, selain kompetensi yang baik juga dibutuhkan sebuah sistem yang dapat memberi keyakinan bahwa penyelenggaraan kegiatann pemerintah dapat berjalan dengan baik dibuktikan dengan melaporkan laporan keuangan secara andal, mengamankan aset serta mendorong kepatuhan terhadap peraturan dan Undang-Undang yang ditetapkan agar tujuan tercapai. Sistem ini disebut sistem pengendalian internal.

Menurut PP No. 60 tahun 2008 yang dimaksud dengan Sistem Pengendalian Internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset Negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Perwujudan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa memerlukan pengendalian atas kegiatan yang dilakukan. . Pengendalian tersebut dilakukan sesuai dengan pedoman Sistem Pengendalian Intern (SPIP) sebagai acuan dan standar untuk mengendalikan pelaksanaan dana desa. Pengendalian nternal

menjaga proses bisnis pemerintah sejalandengan tujuan yang dinyatakan. Rencana dan metode organisasi untuk memelihara dan melindungi aset serta menghasilkan informasi yang akurat dan andal merupakan inti dari pengendalian internal (Martini dkk, 2019). Pelaksanaan pengendalian intern dalam organisasi bertujuan untuk memastikan bahwa proses pencapaian tujuan dilakukan dengan benar dan untuk mengurangi risiko yang tidak diinginkan zulia hanum (2021).

2.1.4.1 Indikator Sistem Pengendalian Internal

Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008, bahwa unsur sistem pengendalian intern dalam Peraturan Pemerintah ini mengacu pada unsur Sistem Pengendalian Intern yang telah dipraktikan di lingkungan pemerintah di berbagai negara, yang meliputi:

1. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian merupakan Lingkungan perusahaan yang mencakup sikap para manajemen dan karyawan terhadap pentingnya pengendalian yang ada di organisasi tersebut. Komponen ini meliputi sikap manajemen di semua tingkatan secara umum dan konsep kontrol secara khusus, hal ini mencakup etika, kompetensi, serta integritas, dan kepentingan terhadap kesejahteraan sosial.

2. Penilaian Risiko

Manajemen perusahaan harus dapat mengidentifikasi berbagai resiko yang di hadapi oleh perusahaan. Suatu resiko yang telah diidentifikasi dapat dianalisa dan di evaluasi sehingga dapat diperkirakan intensitas dan tindakan yang dapat meminimalkannya.

3. Kegiatan Pengendalian

Prosedur pengendalian merupakan berbagai proses upaya yang dilakukan oleh manajemen perusahaan untuk menegakkan pengawasan atau pengendalian operasi perusahaan. Prosedur pengendalian meliputi hal-hal sebagai berikut : (1) personil yang kompeten, mutasi tugas dan cuti wajib; (2) pelimpahan tanggung jawab; (3) pemisahan tanggung jawab untuk kegiatan terkait; dan (4) pemisahan fungsi akuntansi, penyimpanan aset dan operasional.

4. Informasi dan komunikasi

Informasi diperlukan oleh semua tingkatan manajemen organisasi untuk mengambil keputusan dan mengetahui kepatuhan terhadap kebijakan yang telah ditentukan. Informasi yang berkualitas diidentifikasi, diambil/diterima, diproses dan dilaporkan oleh sistem informasi. Komunikasi sudah tercakup dalam sistem informasi. Komunikasi terjadi pula dalam bentuk tindakan manajemen. Komunikasi harus dapat menyampaikan pesan dengan jelas dari manajemen bahwa karyawan harus melakukan pengendalian intern dengan serius.

5. Pemantauan Pengendalian Internal

Aktivitas pengawasan atau pemantauan berhubungan dengan penilaian atas mutu pengendalian intern secara berkesinambungan (berkala) oleh manajemen untuk menentukan bahwa pengendalian telah berjalan sebagaimana yang diharapkan, dan dimodifikasi sesuai dengan perkembangan kondisi yang ada dalam perusahaan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Untuk memberikan kejelasan mengenai penelitian yang dilakukan, maka berikut akan disajikan penelitian terdahulu yaitu :

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

No	Penelitian (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Sumber
1	Enggar Wahyuning Pahlawan ¹ Anita Wijayanti ² Suhendro ³ (2020)	Pengaruh kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa	Penelitian ini membuktikan bahwa kompetensi aparatur desa dan partisipasi masyarakat signfikan mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa akan tetapi sistem pengendalian internal dan pemanfaatan teknologi informasi tidak signifikan	https://media.neliti.com/media/publications/319994-pengaruh-kompetensi-aparatur-desa-sistem-b1744b2f.pdf

			mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa	
--	--	--	---	--

2.3 Kerangka Berpikir

2.3.1 Pengaruh Kompetensi Aparat Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Kompetensi merupakan faktor yang dapat mempengaruhi akuntabilitas. Untuk meningkatkan akuntabilitas diperlukan adanya kompetensi. Dalam hal pengelolaan dana desa, aparatur desa harus memiliki kompetensi yang baik untuk dapat mengelola dan melaporkan dana desa tersebut karena kemampuan aparatur desa dalam mengelola keuangan desa dapat meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa, begitu juga sebaliknya (Pahlawan et al., 2020). Kompetensi yang kompetensi dapat mendorong aparat desa memahami proses pengelolaan dana desa secara bertanggung jawab dan transparan sesuai aturan yang berlaku.

Semakin tingginya tingkat kemampuan kompetensi pada aparat desa maka akan meningkat pula akuntabilitas pengelolaan dana desa. aparat desa yg mempunyai kompetensi tinggi akan bisa mengelola dana desa dengan baik. tingginya kompetensi aparat desa berasal dari latar pendidikan yang di tempuh oleh aparat desa. dari penjelasan tersebut dapat

disimpulkan bahwa kompetensi aparat desa merupakan faktor penting yang dapat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa karena keterlibatan sumber daya manusia. Hal ini sejalan dengan beberapa penelitian terdahulu yang diteliti oleh Rr Titiek (2020); Ni Putu Devi et al. (2021); Zulkifli et al. (2021). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi aparat desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan hipotesis:

H1: Kompetensi Aparat Desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

2.3.2 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Sistem Pengendalian Internal dalam Pemerintahan merupakan faktor yang penting, disebabkan dengan adanya sistem pengendalian dapat mempengaruhi pengambilan keputusan internal pemerintah desa dan dapat berimplikasi pada akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa tersebut. Untuk itu dibutuhkan suatu sistem yang dapat memberi keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan pada suatu instansi pemerintah dapat mencapai tujuannya secara efisien dan efektif, melaporkan pengelolaan keuangan secara andal, mengamankan aset dan mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang – undangan. Sistem ini dikenal sebagai Sistem Pengendalian Internal.

Penelitian Rosyidi (2018) menyatakan bahwa sistem pengendalian aparatur dari pemerintah desa memberikan pengaruh positif terhadap

akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa, karena pengawasan pemerintah meningkatkan akuntabilitas keuangan melalui evaluasi dan perbaikan pengendalian internal, manajemen risiko dan proses tata kelola pemerintahan.

H2: Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa.

2.3.3 Pengaruh Kompetensi Aparat Desa dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan keuangan desa tidak terlepas dari akuntabilitas (Oktavia et al., 2020) Akuntabilitas menjadi sebuah kontrol penuh aparatur atas segala sesuatu yang telah dilakukan dalam sebuah pemerintahan, sehingga peran pemerintah selaku agen menjadi sebuah faktor penting dalam mempertanggungjawabkan kinerja dari pemerintahan kepada prinsipal atau rakyat .

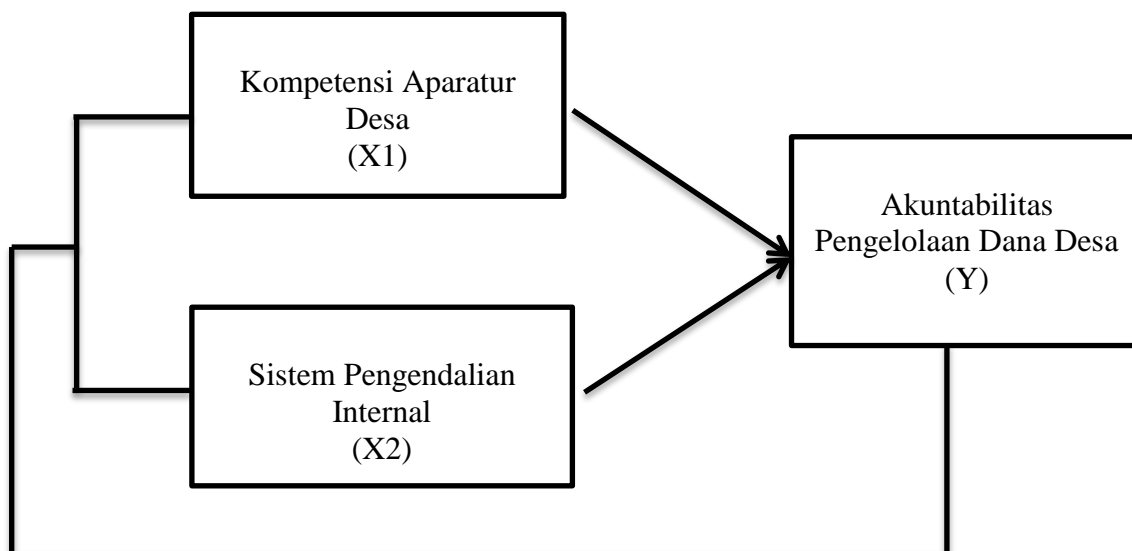
Kompetensi yang dimiliki oleh pengelola dana desa menjadi syarat utama agar akuntabilitas desa bisa berjalan dengan maksimal . Aparat desa yang berkualitas tinggi tahu bagaimana mengelola keuangan desa dengan baik. Tingginya kecakapan seorang aparat desa dapat dilihat dari tingkat pendidikan aparat desa tersebut.

Akuntabilitas merupakan faktor yang erat hubungannya dengan alat-alat pengendalian kegiatan, terutama yang berkaitan dengan pencapaian hasil pelayanan publik. Akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat dicapai melalui sistem pengendalian intern yang baik. Pemerintah desa dapat memusatkan seluruh kekuasaan dan keahliannya untuk

merancang pengendalian internal secara efektif guna mencapai akuntabilitas pengelolaan dana desa yang baik. Semakin tinggi sistem pengendalian dari pihak internal yaitu inspektorat yang semakin tinggi maka dapat meningkatkan akuntabilitas Pemerintah desa terhadap publik (suci et al, 2019).

H3: Kompetensi aparat desa dan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2. 1
Kerangka Konseptual

2.4 Hipotesis

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. Terdapat pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa
2. Terdapat pengaruh sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa
3. Terdapat pengaruh kompetensi aparatur desa dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif metode survei. Metode kuantitatif menurut Sugiyono (2018) adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu dengan menggunakan instrument penelitian dengan tujuan menggambarkan dan menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

3.2 Definisi Operasional

3.2.1 Akuntabilitas Pengelolaan keuangan desa (Y)

Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa merupakan kewajiban aparatur desa dalam memberi pertanggung jawaban atas segala aktivitas mengenai pengelolaan keuangan desa yaitu mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban kepada pihak yang melibatkan oleh seluruh unsur masyarakat kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan dengan memperhatikan konsep Good Governance. Indikator variabel adalah sebagai berikut: 1) Kejujuran dan keterbukaan informasi. 2) Kepatuhan dalam pelaporan. 3) Kesesuaian prosedur. 4) Kecukupan informasi. 5) Ketepatan penyampaian laporan.

3.2.2 Kompetensi Aparatur Desa (X1)

Kompetensi merupakan kemampuan seseorang untuk melakukan atau melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan keterampilan, pengetahuan, kreativitas dan pengalaman yang ada pada dirinya untuk menghasilkan kinerja yang diharapkan (Nurjaya et al., 2021).

Menurut beberapa ahli, kompetensi merupakan karakteristik yang mendasari seseorang mencapai kinerja tinggi dalam pekerjaannya. Pegawai yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup akan bekerja tersendat-sendat, dan juga menyebabkan pemborosan bahan, waktu dan tenaga, serta terlambat menyampaikan laporan keuangan desa. Indikator variabel adalah sebagai berikut : 1) Pengetahuan (*knowledge*) 2) Sikap (*attitude*) 3) Keahlian (*skill*) .

3.2.3 Sistem Pengendalian Internal (X2)

Menurut (Sweetenia et al., 2019) Sistem pengendalian intern merupakan proses penting dari tindakan dan kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus oleh manajemen dan seluruh karyawan untuk memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan perusahaan tercapai. Indikator dalam variabel ini adalah sebagai berikut 1) Lingkungan pengendalian. 2) Penilaian risiko 3) Kegiatan pengendalian 4) Informasi dan komunikasi 5) Pemantauan pengendalian internal.

Tabel 3. 1
Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi operasional	Indikator	Skala Pengukuran
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa merupakan kewajiban perangkat desa segala kegiatan pengelolaan dana desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, Penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kejujuran dan keterbukaan informasi 2. Kepatuhan dalam pelaporan 3. Kesesuaian prosedur 4. Kecukupan informasi 5. Ketepatan penyampaian 	Skala <i>Likert</i> 1-5
Kompetensi Aparatur Desa (X1)	Kompetensi adalah kemampuan seseorang untuk melakukan atau menyelesaikan suatu pekerjaan sesuai dengan keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman yang dimilikinya.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan (<i>knowledge</i>) 2. Sikap (<i>attitude</i>) 3. Keahlian (<i>skill</i>) 	Skala <i>Likert</i> 1-5

Sistem Pengendalian Internal (X2)	Sistem pengendalian internal adalah struktur organisasi, metode dan sumber daya yang melindungi aset perusahaan, mengendalikan keakuratan dan keandalan informasi akuntansi dan mendorong kepatuhan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lingkungan pengendalian 2. Penilaian resiko 3. Kegiatan pengendalian 4. Informasi dan komunikasi 5. Pemantauan pengendalian internal 	Skala <i>Likert</i> 1-5
-----------------------------------	--	---	----------------------------

Sumber : Skripsi 2020

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

3.3.1 Tempat Penelitian

Tempat penelitian ini dilakukan pada seluruh desa yang berada di Kecamatan Rahuning Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara.

3.3.2 Waktu Penelitian

Waktu penyusunan proposal ini dilakukan pada bulan Februari 2023 sampai dengan 08 juli 2023. Untuk secara rinci dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3. 2
Rencana Penyusunan Proposal

No	Jenis Kegiatan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst
1	Pra Riset							
2	Pengajuan Judul							
3	Penulisan Proposal							
4	Seminar Proposal							
5	Riset							
6	Penulisan Skripsi							
7	Meja Hijau							

Sumber: Panduan Penyusunan Skripsi UMSU 2019

3.4 Populasi dan Sampel

3.4.1 Populasi

Menurut (Sugiyono, 2013) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu. Dalam penelitian ini, populasi yang diambil adalah aparaturnya seluruh desa pada 7 desa di Kecamatan Rahuning Kabupaten Asahan.

Tabel 3. 3
Daftar Nama Desa di Kecamatan Rahuning

No	Nama Desa
1	Perk. Gunung Melayu
2	Gunung Melayu
3	Batu Anam
4	Perk. Aek Nagaga
5	Rahuning I
6	Rahuning II
7	Rahuning

Sumber : Kasi PMK Kecamatan Rahuning

3.4.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi (Sugiyono,2013).

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sampel jenuh. Menurut (Sugiyono, 2013) Sampling jenuh merupakan teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang, atau penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil. Dengan istilah lain dari sampel jenuh adalah sensus, dimana semua anggota populasi dijadikan sampel.

Alasan penelitian ini menggunakan teknik sampel jenuh dikarenakan jumlah populasi kecil, maka sampel dalam penelitian ini menggunakan seluruh jumlah populasi untuk digunakan sebagai responden sebanyak 56 orang dan yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah kepala desa, sekretaris desa, kaur keuangan, kaur umum dan tata usaha, kaur perencanaan, kasi pemerintahan, kasi kesejahteraan dan kasi pelayanan.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer atau data yang diperoleh berdasarkan Pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan kuesioner. Teknik pengumpulan data dilakukan secara langsung kepada aparatur desa yang ada di Kecamatan Rahuning. Dengan cara menyebarkan kuesioner yang telah berisi pertanyaan dan nantinya setiap jawaban dari Aparatur Desa akan di ukur dengan Skala Likert.

Menurut (Sugiyono, 2013) Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang ataupun sekelompok orang tentang fenomena sosial. Penulis menggunakan penilaian kuesioner untuk setiap jawaban dengan bobot dari kategori sebagai berikut.

Tabel 3. 4

Skor Penilaian Pada Kuesioner

Bobot	Kategori
5	Sangat Setuju (SS)
4	Setuju (S)
3	Netral (N)
2	Tidak Setuju (TS)
1	Sangat Tidak Setuju (STS)

3.6 Teknik Analisis Data

3.6.1 Uji Kualitas Data

1. Uji Validitas

Uji validitas adalah mengukur koefisien korelasi antara skor suatu pertanyaan atau indikator yang diuji dengan skor total pada variabelnya Herlina (2019: 58). Dasar pengambilan keputusan yang digunakan untuk menguji validitas butir angket adalah:

- a. Jika r hitung positif dan r hitung $>$ r tabel maka variabel tersebut valid
- b. Jika hasil menunjukkan nilai yang signifikan maka masing-masing pertanyaan adalah valid.

3.6.1.1. Uji Realibilitas

Uji reliabilitas dimaksudkan untuk mengukur, mengetahui tingkat kekonsistenan sebuah kuesioner. Kuesioner dikatakan reliabel atau dapat diandalkan jika jawaban dari responden terhadap pernyataan-pernyataan yang terdapat dalam kuesioner tersebut stabil dari waktu ke waktu .

Dalam pengujian ini, peneliti mengukur reliabelnya suatu variabel dengan cara melihat Cronbach Alpha dengan signifikansi yang digunakan lebih besar dari nilai cronbach's alpha lebih dari 0,70. Menurut Ghozali,(2013) dalam (Sweetenia et al., 2019) suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha > 0,70.

3.6.2 Statistik Deskriptif

Statistik Deskriptif adalah statistik yang memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum dan range. Ghozali, 2018, hal 19.

3.6.3 Analisis Regresi Linear Berganda

Menurut Herlina (2019: 129), Analisis regresi linier berganda adalah suatu alat analisis yang digunakan untuk mengetahui pengaruh antara dua atau lebih variabel independen dengan satu variabel dependen.

3.6.4 Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik adalah uji yang digunakan untuk persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi berganda menggunakan Software komputer yaitu *Statistical Package For Social Science* (SPSS 22).

3.6.4.1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk melihat apakah variabel independen dan variabel dependen berdistribusi normal atau tidak (Zulkifl et al., 2021). Uji normalitas data menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov yaitu dengan cara membandingkan probabilitas dengan tingkat nilai signifikansi tertentu sebagai berikut:

- a. Nilai Signifikansi atau probabilitas $< 0,05$ maka distribusi adalah tidak normal.
- b. Nilai Signifikansi atau probabilitas $> 0,05$ maka distribusi adalah normal.

3.6.4.2. Uji Multikolonieritas

Uji Multikolonieritas bertujuan untuk mendeteksi ada tidaknya gejala multikolonieritas di dalam model regresi, dapat dilihat dari nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor (VIF)*. Jadi nilai *tolerance* yang tinggi sama dengan VIF tinggi (karena $VIF = 1/Tolerance$). model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Nilai yang umum dipakai untuk menunjukkan tidak terjadinya multikolinearitas

adalah nilai tolerance harus $\geq 0,1$ atau sama dengan nilai VIF-nya dan dari masing-masing variabel adalah ≤ 10 .

3.6.4.3. Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Zulkifl et al., 2021). Dasar analisis:

- a. Jika pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengidentifikasi telah terjadi heterokedastisitas
- b. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik tidak menyebar diatas dan dibawah 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas.

3.6.5 Uji Hipotesis

3.6.5.1. Uji T (Parsial)

Uji Parsial atau Uji t digunakan untuk membuktikan bahwa hipotesis awal tentang pengaruh kompetensi aparatur desa (X1), dan Sistem Pengendalian Internal (X2) sebagai variabel independen terhadap akuntabilitas pengelolaan dan desa (Y) sebagai variabel dependen.

Adapun kriteria pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:

- a. H_0 diterima jika $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$ pada $\alpha = 0.05$

b. H_0 ditolak jika $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ pada $\alpha = 0.05$

1. Hipotesis nihil (H_0) yaitu hipotesis yang menyatakan ada hubungannya atau pengaruh antara variabel dengan variabel lain. Contohnya: Tidak ada hubungan antara tingkat pendidikan orang tua dengan prestasi belajar siswa SD.
2. Hipotesis alternatif (H_a) adalah hipotesis yang menyatakan tidak adanya hubungan atau pengaruh antara variabel dengan variabel lain. Contohnya: Ada hubungan antara tingkat pendidikan orang tua dengan prestasi belajar siswa SD.

3.6.5.2. Uji F (Simultan)

Uji simultan atau uji F bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. (Zulkifl et al., 2021) Variabel independen yaitu terdiri atas kompetensi aparatur desa (X_1) dan Sistem Pengendalian Internal (X_2) Variabel dependen yaitu akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y).

Adapun kriteria pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:

- a. H_0 diterima jika $F_{\text{hitung}} < F_{\text{tabel}}$ pada $\alpha = 0.005$
 - b. H_0 ditolak jika $F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}}$ pada $\alpha = 0.005$
1. Hipotesis nihil (H_0) yaitu hipotesis yang menyatakan ada hubungannya atau pengaruh antara variabel dengan variabel lain. Contohnya: Tidak ada hubungan antara tingkat pendidikan orang tua dengan prestasi belajar siswa SD.

2. Hipotesis alternatif (H_a) adalah hipotesis yang menyatakan tidak adanya hubungan atau pengaruh antara variabel dengan variabel lain.
Contohnya: Ada hubungan antara tingkat pendidikan orang tua dengan prestasi belajar siswa SD.

3.6.6 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Pengujian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui besarnya kemampuan model dalam menerangkan variasi dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antar 0 sampai 1. Semakin kecil nilai R^2 , maka semakin terbatas kemampuan variabelvariabel independen dalam menjelaskan variabel determinannya. Penelitian ini juga menggunakan adjusted R Square ($Adj R^2$) karena terdapat lebih dari satu variabel independen dan apabila hanya ada 1 variabel independen maka menggunakan R Square (R^2) dalam menjelaskan pengaruh variabel independennya (Ghozali, 2016)

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Deskripsi Data

4.1.1 Gambaran Umum Objek

Objek dalam penelitian ini adalah aparatur desa yang memiliki wewenang dalam menjalankan pengelolaan dana yang terdiri atas kepala desa, sekretaris desa, Kaur Keuangan, Kaur Umum & Tata Usaha, K. Perencanaan, K. Pemerintahan, K. Kesra, dan K. Pelayanan sedangkan subjek dalam penelitian ini adalah seluruh desa yang ada pada Kecamatan Rahuning dengan jumlah desa sebanyak 7 Desa. Penelitian ini mempunyai tujuan guna untuk melihat pengaruh Kompetensi Aparatur Desa dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pada Kecamatan Rahuning. data penulis yang gunakan dalam penelitian ini adalah data primer. dimana data yang penulis berdasarkan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membagikan kuesioner secara langsung kepada responden.

Kecamatan Rahuning berada di Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara dengan Luas Wilayah 18.427 Km² dengan jumlah penduduk 18.827 jiwa. Kecamatan Rahuning saat ini di pimpin oleh Bapak Mohammad Yasir, SH yang menjabat sebagai Camat pada Kecamatan Rahuning. Kecamatan Rahuning memiliki 7 desa dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4. 1**Daftar Nama Desa di Kecamatan Rahuning**

No	Nama Desa
1	Perk. Gunung Melayu
2	Gunung Melayu
3	Batu Anam
4	Perk. Aek Nagaga
5	Rahuning I
6	Rahuning II
7	Rahuning

Sumber : Kasi PMK Kecamatan Rahuning

Jumlah kuesioner yang dibagikan pada setiap desa berjumlah 8 Kuesioner. Dari total kuesioner yang telah dibagikan ke masing-masing desa yaitu sebanyak 56 kuesioner, jumlah kuesioner yang telah diisi dan dikembalikan sebanyak 56 kuesioner.

Dalam penelitian ini yang menjadi responden adalah aparatur desa, yang terdiri atas Kepala desa, sekretaris desa, kaur keuangan, kaur umum dan tata usaha, kaur perencanaan, kasi pemerintahan, kasi kesejahteraan dan kasi pelayanan.

4.1.2 Demografi Responden

Penelitian ini dilakukan terhadap aparatur desa yang ada di desa-desa pada Kecamatan Rahuning. Dengan jumlah responden sebanyak 56 orang. Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner kepada 56 responden dalam penelitian ini, maka diperoleh demografi responden sebagai berikut:

Tabel 4. 2
Jenis Kelamin Responden

		Jenis Kelamin			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki-Laki	15	26.8	26.8	26.8
	Perempuan	41	73.2	73.2	100.0
	Total	56	100.0	100.0	

Sumber: Data diolah SPSS 26 tahun 2023

Berdasarkan tabel 4.2 dapat dijelaskan bahwa terdapat 15 responden atau 26,8% responden yang berjenis kelamin laki laki dan terdapat 41 responden atau 73,2% responden perempuan.

Tabel 4. 3
Usia Responden

		Usia			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	20-30	17	30.4	30.4	30.4
	30-40	19	33.9	33.9	64.3
	40-50	12	21.4	21.4	85.7
	50-60	8	14.3	14.3	100.0
	Total	56	100.0	100.0	

Sumber: Data diolah SPSS 26 tahun 2023

Berdasarkan tabel 4.3 dapat dijelaskan bahwa responden yang berusia 20-30 tahun terdiri dari 17 responden atau 30,4%, responden yang berusia 30-40 tahun terdiri dari 19 responden atau 33,9%, responden yang berusia 40-50 tahun terdiri dari 12 responden atau 21,4% dan responden yang berusia 50-60 terdiri dari 8 responden atau 14,3%, sehingga total keseluruhan responden adalah 56 responden dengan tingkat persentase 100%.

Tabel 4. 4
Tingkat Pendidikan Responden

		Pendidikan			Cumulative
		Frequency	Percent	Valid Percent	Percent
Valid	SMA	34	60.7	60.7	60.7
	D3	4	7.1	7.1	67.9
	S1	18	32.1	32.1	100.0
	Total	56	100.0	100.0	

Sumber: Data diolah SPSS 26 tahun 2023

Berdasarkan tabel 4.4 dapat dijelaskan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini yaitu berpendidikan SMA sebanyak 34 orang atau 60,7%, responden yang berpendidikan Diploma (D3) sebanyak 4 orang atau 7,1%, responden yang berpendidikan Strata 1 (S1) sebanyak 18 orang atau 32,1%, sehingga total keseluruhan responden adalah 56 responden dengan tingkat persentase 100%.

Tabel 4. 5
Jabatan Responden

		Jabatan			Cumulative
		Frequency	Percent	Valid Percent	Percent
Valid	KEPALA DESA	7	12.5	12.5	12.5
	SEKDES	7	12.5	12.5	25.0
	K.KEUANGAN	7	12.5	12.5	37.5
	K.UMUM & T.U	7	12.5	12.5	50.0
	K.PERENCANAAN	7	12.5	12.5	62.5
	K.PEMERINTAHAN	7	12.5	12.5	75.0
	K.KESRA	7	12.5	12.5	87.5
	K. PELAYANAN	7	12.5	12.5	100.0
	Total	56	100.0	100.0	

Sumber: Data diolah SPSS 26 tahun 2023

Berdasarkan tabel 4.5 dapat dijelaskan bahwa responden yang berjabat Kepala Desa terdiri dari 7 responden atau 12,5%, responden yang berjabat Sekretaris Desa terdiri dari 7 responden atau 12,5%, responden yang berjabat

Kaur Keuangan terdiri dari 7 responden atau 12,5%, responden yang berjabat Kaur Umum Dan Tata Usaha terdiri dari 7 responden atau 12,5%, responden yang berjabat Kaur Perencanaan terdiri dari 7 responden atau 12,5%, responden yang berjabat Kasi Pemerintahan terdiri dari 7 responden atau 12,5%, responden yang berjabat Kasi Kesejahteraan terdiri dari 7 responden atau 12,5%, dan responden yang berjabat Kasi Pelayanan terdiri dari 7 responden atau 12,5%, sehingga total keseluruhan responden adalah 56 responden dengan tingkat persentase 100%.

Tabel 4. 6

Lama Bekerja Responden

		Lama Bekerja			Cumulative
		Frequency	Percent	Valid Percent	Percent
Valid	1-2 TAHUN	2	3.6	3.6	3.6
	2-3 TAHUN	3	5.4	5.4	8.9
	3-4 TAHUN	2	3.6	3.6	12.5
	5 TAHUN KE ATAS	49	87.5	87.5	100.0
	Total	56	100.0	100.0	

Sumber: Data diolah SPSS 26 tahun 2023

Berdasarkan tabel 4.6 dapat dijelaskan bahwa lama bekerja responden dalam penelitian ini sudah bekerja 1-2 tahun terdiri dari 2 responden atau 3,6%, responden yang sudah bekerja selama 2-3 tahun terdiri dari 3 responden atau 5,4%, responden yang sudah bekerja 3-4 tahun terdiri dari 2 responden atau 3,6% dan responden yang sudah bekerja 5 tahun ke atas terdiri dari 49 responden atau 87,5%, sehingga total keseluruhan responden adalah 56 responden dengan tingkat persentase 100%.

4.1.3 Distribusi Tanggapan Responden

Penelitian ini dilakukan terhadap aparatur desa yang ada di desa-desa pada Kecamatan Rahuning. Dengan jumlah responden sebanyak 56 orang. Berikut akan

dijelaskan hasil penelitian dari data kuesioner yang sudah dibagikan kepada responden, namun sebelum dilakukan pengujian hipotesis penulis akan menjabarkan terlebih dahulu persentase dari jawaban responden untuk setiap kuesioner yang telah dibagikan, penulis telah menetapkan bahwa jawaban dari masing-masing reponden akan menggunakan skala likert dengan skor 1 sampai dengan 5.

Tabel 4. 7

Kriteria Jawaban Responden

Kriteria	Bobot	Keterangan
SS	5	Sangat Setuju
S	4	Setuju
N	3	Netral
TS	2	Tidak Setuju
STS	1	Sangat Tidak Setuju

Tabel 4. 8

Skor Angket X1 Kompetensi Aparatur Desa

NO	ITEM PERNYATAAN	SS		S		N		TS		STS		TOTAL	
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	Aparatur desa mampu memahami siklus akuntansi dengan baik	14	25.0	23	41.1	19	33.9	0	0	0	0	56	100
2	Tugas pokok, fungsi dan uraian tugas merupakan hal yang harus dikerjakan	21	37.5	31	55.4	4	7.1	0	0	0	0	56	100
3	Pengetahuan akan teknologi informasi	24	42.9	29	51.8	3	5.4	0	0	0	0	56	100

	menunjang kemampuan dalam bekerja												
4	Aparatur desa mampu membuat jurnal untuk setiap transaksi dengan benar	11	19.6	24	42.9	21	37.5	0	0	0	0	56	100
5	Aparatur desa mampu memposting jurnal ke dalam buku besar	12	21.4	29	51.8	20	35.7	0	0	0	0	56	100
6	Pelatihan terkait dengan penyusunan laporan keuangan berguna untuk mengembangkan kemampuan aparatur desa	24	42.9	29	51.8	3	5.4	0	0	0	0	56	100
7	Aparatur desa mampu untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan dengan baik	16	28.6	36	64.3	4	7.1	0	0	0	0	56	100
8	Aparatur desa dapat memecahkan masalah yang terjadi dalam pekerjaan	15	28.6	35	62.5	6	10.7	0	0	0	0	56	100
9	Memiliki tanggung jawab sosial dalam kepentingan publik	11	19.6	42	75.0	3	5.4	0	0	0	0	56	100
10	Mempunyai kemauan untuk mengembangkan diri dan belajar terus – menerus	14	25.0	35	62.5	7	12.5	0	0	0	0	56	100

11	Dapat melakukan pekerjaan dengan kualitas kerja dengan baik	14	25.0	36	64.3	6	10.7	0	0	0	0	56	100
----	---	----	------	----	------	---	------	---	---	---	---	----	-----

Sumber: Data diolah SPSS 26 tahun 2023

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa Kompetensi Aparatur Desa di Kecamatan Rahuning dapat dikatakan baik, terlihat dari jawaban responden pada setiap kuesioner yang mayoritas menjawab setuju dan sangat setuju. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Aparatur Desa yang ada di Kecamatan Rahuning memiliki kompetensi yang baik dalam pengelolaan dana desa. Hal ini dibuktikan oleh pengetahuan aparatur desa mengenai akuntansi dapat dikatakan baik dan aparatur desa memiliki pengetahuan mengenai perundang-undangan desa dengan baik.

Tabel 4.9

Skor Angket X2 (Sistem Pengendalian Internal)

NO	ITEM PERNYATAAN	SS		S		N		TS		STS		TOTAL	
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	Pemerintah desa memiliki struktur organisasi yang jelas	33	58.9	22	39.3	1	1.8	0	0	0	0	56	100
2	Adanya kejelasan tugas dan wewenang dalam pemerintah desa	27	48.2	29	51.8	0	0	0	0	0	0	56	100
3	Peralatan dan persediaan selalu disimpan ditempat yang diamankan	23	41.1	28	50.0	5	8.9	0	0	0	0	56	100

	secara fisik dan dilindungi dari kerusakan												
4	Memiliki rencana pengelolaan atau mengurangi risiko pelanggaran	15	26.8	32	57.1	9	16.1	0	0	0	0	56	100
5	Pengeluaran uang pada pemdes selalu di dokumentasikan pada bukti pengeluaran kas	13	23.2	35	62.5	8	14.3	0	0	0	0	56	100
6	Komunikasi telah dilaksanakan secara terbuka dan efektif	13	23.2	41	73.2	2	3.6	0	0	0	0	56	100
7	Selalu ada tindak lanjut dari setiap hasil temuan/ review dan saran yang diberikan oleh Inspektorat	17	30.4	34	60.7	5	8.9	0	0	0	0	56	100
8	Aparatur desa selalu menerapkan perilaku dan norma yang baik dalam setiap kegiatan	23	41.1	23	41.1	10	17.9	0	0	0	0	56	100
9	Kepala desa selaku pemimpin pemerintahan desa sering memberikan keteladanan dalam pelaksanaan peraturan yang berlaku	38	67.9	13	23.2	5	8.9	0	0	0	0	56	100
10	Dalam kegiatan pelatihan mengenai	18	32.1	26	46.4	12	21.4	0	0	0	0	56	100

	<p>pengelolaan keuangan untuk meningkatkan kompetensi para pegawai pemerintahanan desa rata-rata diadakan setiap 3 bulan sekali sehingga dengan pelatihan yang cukup intens dapat meningkatkan kompetensi aparatur desanya</p>												
11	<p>Dalam kegiatan pelatihan mengenai pengelolaan keuangan untuk meningkatkan kompetensi para pegawai pemerintahanan desa rata-rata diadakan setiap 3 bulan sekali sehingga dengan pelatihan yang cukup intens dapat meningkatkan kompetensi aparatur desanya</p>	14	25.0	30	53.6	11	19.6	1	1.8	0	0	56	100
12	<p>Struktur organisasi instansi telah menggambarkan dengan jelas mengenai</p>	23	41.1	27	48.2	6	10.7	0	0	0	0	56	100

	tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari setiap bagian												
13	Wewenang yang diberikan kepada pegawai sesuai dengan tingkat tanggung jawabnya secara cukup sesuai dengan tingkat tanggung jawabnya	21	37.5	21	37.5	14	25.0	0	0	0	0	56	100
14	Aparat pengawas internal cukup memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan dalam pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah desa	13	23.2	24	42.9	19	33.9	0	0	0	0	56	100
15	Aparatur desa menjalin hubungan yang baik dengan instansi terkait sehubungan dengan program kerja yang dilaksanakan	15	26.8	23	41.1	18	32.1	0	0	0	0	56	100
16	Kepala desa selalu melakukan review kinerja yg dibandingkan dengan	18	32.1	23	41.1	15	26.8	0	0	0	0	56	100

	tolak ukur kinerja												
17	Adanya pemisahan fungsi dari setiap tugas mengenai kegiatan yang sedang dilakukan	17	30.4	34	60.7	5	8.9	0	0	0	0	56	100
18	Terdapat 4 pegawai yang memiliki fungsi yg berbeda terhadap pencatatan, penghapusan dan otorisasi transaksi serta mempunyai akses verifikasi dan pembayaran transaksi	12	21.4	21	37.5	23	41.1	0	0	0	0	56	100
19	Melakukan pengaman aset yang dimiliki untuk menghindari adanya fraud (kesalahan yang disengaja)	11	19.6	35	62.5	10	17.9	0	0	0	0	56	100
20	Setiap transaksi memiliki bukti pendukung sebelum dilakukannya pencatatan	15	26.8	35	62.5	6	10.7	0	0	0	0	56	100
21	Dalam pencatatan transaksi, kode akun yang digunakan adalah kode akun yang sesuai dengan transaksi yg dimaksud	17	30.4	34	60.7	5	8.9	0	0	0	0	56	100

22	Pemerintah desa memiliki pejabat yang berwenang untuk setiap transaksi yang berjalan	18	32.1	35	62.5	3	5.4	0	0	0	0	56	100
23	Terdapat 4 pegawai yg memiliki wewenang yg berbeda terhadap pencatatan, penghapusan dan otorisasi transaksi serta mempunyai akses verifikasi dan pembayaran transaksi	14	25.0	28	50.0	14	25.0	0	0	0	0	56	100
24	Pemerintah desa selalu melakukan pembatasan akses terhadap pegawai desa yang akan mengelola sumber daya yang dimiliki. Terdapat 4 pegawai yang memiliki fungsi yang berbeda terhadap pencatatan, penghapusan dan otorisasi transaksi serta mempunyai akses verifikasi dan pembayaran transaksi	12	21.4	24	42.9	20	35.7	0	0	0	0	56	100
25	pemerintah desa telah menyediakan alat	15	26.8	33	58.9	8	14.3	0	0	0	0	56	100

	pendukung untuk berbagai transaksi dan penyajian laporan keuangan seperti perangkat keras (hardware)												
26	Pemerintah desa telah mengimplementasikan sistem informasi manajemen pemerintah dalam bentuk sistem aplikasi yang dapat menunjang penyajian laporan keuangan	33	58.9	15	26.8	8	14.3	0	0	0	0	56	100
27	Pemerintah desa selalu melakukan evaluasi tentang kelebihan dan kelemahan serta membuat rekomendasi untuk memperbaiki pengendalian internal	15	26.8	35	62.5	6	10.7	0	0	0	0	56	100

Sumber: Data diolah SPSS 26 tahun 2023

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa Sistem pengendalian intern di Kecamatan Rahuning dapat dikatakan baik, terlihat dari jawaban responden pada setiap kuesioner yang mayoritas menjawab setuju dan sangat setuju. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sistem pengendalian intern yang ada di Kecamatan Rahuning memiliki pengendalian intern dalam pengelolaan dana desa.

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Kecamatan Rahuning dapat dikatakan baik, terlihat dari jawaban responden pada setiap kuesioner yang mayoritas menjawab setuju dan sangat setuju. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Penerapan Sistem Keuangan Desa dapat mengelola keuangan desa dengan penuh pertanggungjawaban. Hal ini dapat dilihat bahwa dengan diterapkannya Sistem Keuangan Desa dapat memberikan informasi kepada publik secara terbuka dan penuh pertanggung jawaban, sistem keuangan desa selalu dapat menghasilkan output laporan keuangan desa yang mudah dimengerti oleh publik sehingga dapat mengurangi terjadinya kecurangan pada laporan keuangan desa.

Tabel 4. 10

Skor Aket Y (Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa)

NO	ITEM PERNYATAAN	SS		S		N		TS		STS		TOTAL	
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	Pengelolaan keuangan dana desa selalu disusun secara jujur, dan sesuai dengan Permendagri No. 13 Tahun 2014 tentang pengelolaan desa	17	30.4	38	67.9	1	1.8	0	0	0	0	56	100
2	Pengelolaan keuangan desa selalu disajikan secara terbuka dan transparan	28	50.0	27	48.2	1	1.8	0	0	0	0	56	100

3	Realisasi dana desa selalu di informasikan melalui pembuatan spanduk/baliho	23	41.1	33	58.9	0	0	0	0	0	0	56	100
4	Dalam penyusunan laporan keuangan desa dilakukan sesuai undang- undang yang berlaku	18	32.1	36	64.3	2	3.6	0	0	0	0	56	100
5	Dalam penyampaian laporan keuangan desa dilakukan secara tepat waktu dan menyeluruh	9	16.1	42	75.0	5	8.9	0	0	0	0	56	100
6	Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan desa selalu dilakukan sesuai dengan prosedur undang-undang desa	13	23.2	42	75.0	1	1.8	0	0	0	0	56	100
7	Dana desa yang dipakai selalu dicatat dengan jujur dan transparan	12	21.4	37	66.1	7	12.5	0	0	0	0	56	100
8	Pengumuman tentang penyaluran dana desa selalu bisa di dapat setiap waktu	14	25.0	30	53.6	9	16.1	3	5.4	0	0	56	100

Sumber: Data diolah SPSS 26 tahun 2023

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Rahuning dapat dikatakan sangat baik, hal ini terlihat dari jawaban responden pada setiap kuesioner yang mayoritas menjawab setuju dan sangat setuju. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam penyampaian dan penyusunan keuangan desa sudah berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Aparatur desa yang menjalankan dan yang melakukan pengelolaan keuangan desa sudah bersikap jujur dan penuh keterbukaan kepada publik atas pelaporan dana desa yang dibuat sehingga dapat dipertanggung jawabkan sepenuhnya.

4.2 Uji Kualitas Data

4.2.1 Uji Validitas

Uji Validitas digunakan untuk menentukan valid atau tidaknya suatu kuesioner. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh yang satu dengan yang lainnya antara variabel Kompetensi Aparatur Desa (X1) dan Sistem Pengendalian Internal (X2 terhadap variabel Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y) yang telah didapat dari hasil jawaban responden atas kuesioner yang telah disebarkan yaitu sebagai berikut:

Tabel 4. 11

Validitas Kompetensi Aparatur Desa (X1)

N = 56

Pernyataan	r Hitung	r Tabel	Keterangan
1	0,845	0,263	Valid
2	0,879	0,263	Valid
3	0,744	0,263	Valid
4	0,813	0,263	Valid
5	0,846	0,263	Valid
6	0,873	0,263	Valid

7	0,718	0,263	Valid
8	0,569	0,263	Valid
9	0,648	0,263	Valid
10	0,651	0,263	Valid
11	0,753	0,263	Valid

Sumber: Data diolah SPSS 26 tahun 2023

Berdasarkan tabel 4.13 diatas dapat dilihat bahwa nilai r hitung > dari r tabel sebesar (0,263) dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua item dalam indikator Kompetensi Aparatur Desa (X1) yaitu valid dan layak untuk di uji.

Tabel 4. 12

Validitas Sistem Pengendalian Internal (X2)

N = 56

Pernyataan	r Hitung	r Tabel	Keterangan
1	0,434	0,263	Valid
2	0,426	0,263	Valid
3	0,572	0,263	Valid
4	0,792	0,263	Valid
5	0,755	0,263	Valid
6	0,815	0,263	Valid
7	0,770	0,263	Valid
8	0,631	0,263	Valid
9	0,501	0,263	Valid
10	0,715	0,263	Valid
11	0,742	0,263	Valid
12	0,509	0,263	Valid
13	0,695	0,263	Valid
14	0,501	0,263	Valid
15	0,407	0,263	Valid
16	0,719	0,263	Valid
17	0,765	0,263	Valid
18	0,744	0,263	Valid
19	0,723	0,263	Valid
20	0,710	0,263	Valid
21	0,847	0,263	Valid
22	0,830	0,263	Valid

23	0,750	0,263	Valid
24	0,748	0,263	Valid
25	0,711	0,263	Valid
26	0,496	0,263	Valid
27	0,772	0,263	Valid

Sumber: Data diolah SPSS 26 tahun 2023

Berdasarkan tabel 4.14 diatas dapat dilihat bahwa nilai r hitung > dari r tabel sebesar (0,263) dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua item dalam indikator Sistem Pengendalian Internal (X2) yaitu valid dan layak untuk di uji.

Tabel 4. 13

Validitas Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)

Pernyataan	r Hitung	r Tabel	Keterangan
1	0,449	0,263	Valid
2	0,547	0,263	Valid
3	0,502	0,263	Valid
4	0,645	0,263	Valid
5	0,594	0,263	Valid
6	0,565	0,263	Valid
7	0,678	0,263	Valid
8	0,370	0,263	Valid

Sumber: Data diolah SPSS 26 tahun 2023

Berdasarkan tabel 4.17 diatas dapat dilihat bahwa nilai r hitung > dari r tabel sebesar (0,263) dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua item dalam indikator Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y) yaitu valid dan layak untuk di uji.

4.2.2 Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas dilakukan untuk menguji apakah jawaban dari responden konsisten atau stabil. Berikut hasil uji reliabilitas variabel dalam penelitian ini. Dari uji reliabilitas yang telah dilakukan, maka didapat hasil Cronbach's Alpha yang akan disajikan secara lengkap dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4. 14
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Batasan	Keterangan
KAD (X1)	0,926	0,600	Realibel
SPI (X2)	0,951	0,600	Realibel

Sumber: Data diolah SPSS 26 tahun 2023

Berdasarkan tabel 4.14 dapat disimpulkan bahwa seluruh pernyataan mengenai Kompetensi Aparatur Desa (X1) dan Sistem Pengendalian Internal (X2) terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dalam kuesioner dikatakan Reliabel. Hal ini dapat dilihat dari nilai Cronbach's Alpha masing-masing sebesar $0,926 > 0,600$: $0,951 > 0,600$ hal ini menunjukkan bahwa nilai Cronbach's Alpha lebih besar dari 0,600 yang berarti semua pernyataan yang berhubungan dengan kompetensi aparatur desa dan Sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dinyatakan baik dan reliabel.

4.3 Analisis Data

4.3.1 Statistik Deskriptif

Bagian ini merupakan bagian yang digunakan untuk menganalisis data yang berasal dari data-data yang telah dijelaskan pada sub-sub sebelumnya. Dimana data-data yang dianalisis dimulai dari asumsi-asumsi yang digunakan untuk suatu statistik tertentu. Berikut adalah data perhitungan data statistik deskriptif dalam penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut.

Tabel 4. 15
Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kompetensi Aparatur Desa	56	34.00	54.00	45.4286	5.25999
Sistem Pengendalian Internal	56	83.00	133.00	112.5357	11.82442
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	56	26.00	50.00	34.1429	3.33809
Valid N (listwise)	56				

Sumber: Data diolah SPSS 26 tahun 2023

Dari tabel 4.15 dapat dilihat bahwa pada variabel Kompetensi Aparatur Desa dan Sistem Pengendalian Internal dengan jumlah data (N) sebanyak 56 responden dalam penelitian ini. Variabel kompetensi aparatur desa memiliki nilai minimum sebesar 34 dan nilai maksimum sebesar 54 dengan standar deviasi yang diperoleh sebesar 5,259 dan memiliki nilai mean sebesar 45,42 yang mendekati nilai maksimum 54 sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata kompetensi aparatur desa adalah tinggi.

Variabel Sistem Pengendalian Internal memiliki nilai minimum sebesar 83 dan nilai maksimum sebesar 133 dengan standar deviasi yang diperoleh sebesar 11,824 dan memiliki nilai mean sebesar 112,53 yang mendekati nilai maksimum 133 sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata sistem pengendalian internal adalah tinggi.

Variabel Akuntabilitas pengelolaan dana desa memiliki nilai minimum sebesar 26 dan nilai maksimum sebesar 50 dengan standar deviasi yang diperoleh sebesar 3,338 dan memiliki nilai mean sebesar 34,14 yang mendekati nilai

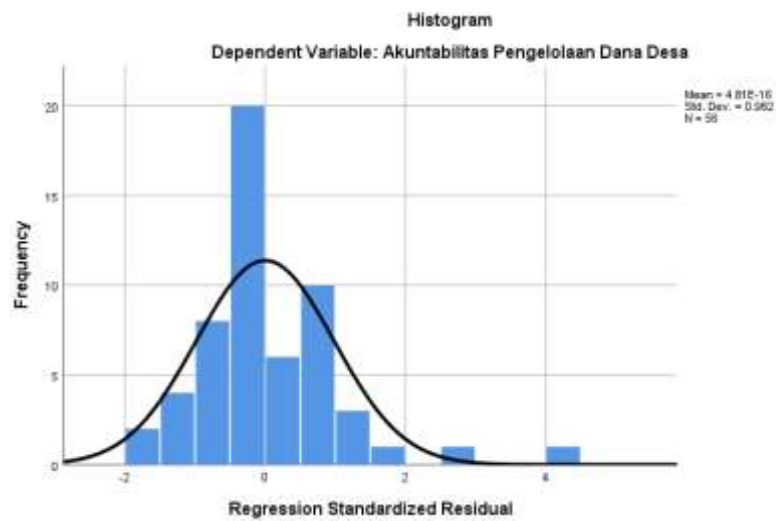
maksimum 50 sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata penerapan sistem keuangan desa adalah tinggi.

Semakin tinggi tingkat standar devisiasinya maka akan semakin heterogenitas, yang berarti bahwa jawaban responden terhadap pertanyaan yang ada pada kuesioner semakin bervariasi. Sedangkan semakin rendah tingkat devisiasinya maka jawaban responden terhadap pertanyaan pada kuesioner semakin homogen yang berarti bahwa variasi jawaban semakin kecil. Dalam penelitian ini standar devisiasi untuk masing-masing variabel adalah kompetensi aparatur desa sebesar 5,259, sistem pengendalian internal sebesar 11,824 dan akuntabilitas pengelolaan dana desa sebesar 3,338. Hal ini menjelaskan bahwa jawaban responden terhadap pertanyaan pada kuesioner tidak terlalu bervariasi, rata-rata responden mengisi lembaran jawaban kuesioner pada skala 4 dan 5 sehingga dapat dikatakan homogen.

4.3.2 Uji Asumsi Klasik

4.3.2.1 Uji Normalitas

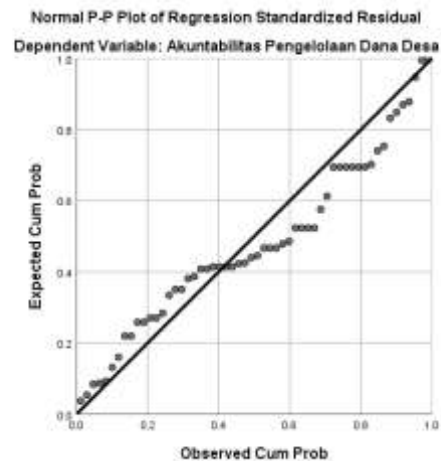
Uji normalitas adalah uji yang digunakan untuk melihat apakah data penelitian terdistribusikan dengan secara normal atau tidak. Uji Normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji dengan melihat grafik probability plot of regression standardized residual sebagai berikut:



Gambar 4. 1

Grafik Histogram

Berdasarkan pada gambar 4.1, residual data telah menunjukkan kurva normal yang membentuk lonceng sempurna. Maka dari itu dalam hal ini dapat dikatakan bahwa data berdistribusi normal.



Gambar 4. 2

Grafik Normail P-Plot

Dari gambar grafik 4.2 dapat dilihat bahwa grafik P-P Plot diatas sebaran data memusat pada garis rata-rata dan median atau nilai P-P Plot Regression standardlized terletak di garis diagonal/mengikuti garis diagonal, maka dari itu

dapat dikatakan bahwa data penelitian memiliki penyebaran atau terdistribusi normal. Dengan melihat grafik histogram dan P-Plot maka dapat dikatakan data penelitian adalah normal dan penelitian tersebut dapat diteruskan.

4.3.2.2 Uji Multikolinearitas

Uji ini digunakan untuk melihat variabel-variabel independen tidak memiliki korelasi dengan variabel dependen. Pengujian ini dapat dilakukan dengan menggunakan Varians Inflation Faktor (VIP) dan tolerance. Hasil pengujian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4. 16
Hasil Multikolinearitas

Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			Collinearity Statistics			
B	Std. Error	Beta	T	Sig.	Tolerance	VIF		
(Constant)		21.765	3.826		5.689	.000		
Kompetensi Aparatur Desa		.428	.114	.675	3.766	.000	.424	2.356
Sistem Pengendalian Internal		-.063	.051	-.223	-1.244	.219	.424	2.356

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Sumber: Data diolah SPSS 26 tahun 2023

Berdasarkan tabel 4.16 diatas dapat diketahui bahwa Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal, memiliki nilai tolerance yang dimana masing-masing $>0,1$. Hal ini menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut tidak menunjukkan terjadinya Multikolinearitas. Begitu juga dengan tabel VIF yang menunjukkan bahwa nilai VIF-nya < 10 , ini juga yang dapat menunjukkan bahwa

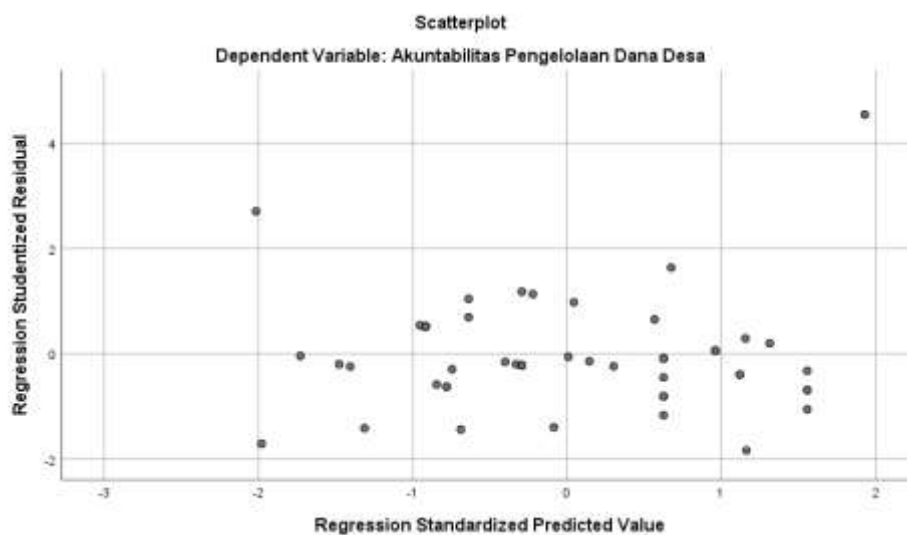
variabel – variabel independen yang dipakai tidak menunjukkan terjadinya Multikolinearitas.

4.3.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk melihat apakah dalam model regresi tidak terjadi ketidaksamaan varian dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lain.

Dasar pengambilan keputusan untuk uji heteroskedastisitas adalah sebagai berikut:

- a. Jika ada pola tertentu, seperti titik yang membentuk pola tertentu teratur, maka telah terjadi heteroskedastisitas
- b. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 dan sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.



Gambar 4. 3

Grafik Heteroskedastisitas

Dari gambar 4.3 dapat dilihat bahwa hasil pada tabel diatas menunjukkan bahwa titik-titik tidak membentuk pola tertentu atau tidak terdapat pola yang jelas

serta titik-titik yang terdapat di gambar tersebut menyebar diatas dan dibawah angka 0 (nol) pada sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Dengan demikian, asumsi-asumsi normalitas, multikolenaritas dan heteroskedastisitas dalam model regresi dapat dipenuhi oleh model ini.

4.3.3 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis Regresi Linear Berganda dilakukan untuk menguji pengaruh variabel bebas yaitu Kompetensi Aparatur Desa (X1) dan Sistem Pengendalian Internal (X2) secara keseluruhan terhadap variabel terikat yaitu Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y). Hasil uji regresi linear berganda dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4. 17
Analisis Regresi Linear Berganda

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
Model		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	21.765	3.826		5.689	.000
	Kompetensi Aparatur Desa	.428	.114	.675	3.766	.000
	Sistem Pengendalian Internal	-.063	.051	-.223	-1.244	.219

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Sumber: Data diolah SPSS 26 tahun 2023

Dari tabel diatas dapat diambil persamaan:

$$Y = 21,765 + 0,428X_1 - 0,063X_2 + e$$

Hasil persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

- Konstanta (α) = 21,765, nilai konstanta bernilai positif artinya jika variabel Kompetensi Aparatur Desa dan Sistem Pengendalian internal,

tidak mengalami perubahan atau $= 0$, maka akan menaikkan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa sebesar 21,76%

- b. Koefisien Regresi X_1 (β_1) = 0,428, menunjukkan Koefisien Regresi variabel Kompetensi Aparatur Desa (X_1) artinya apabila variabel independen lain memiliki nilai tetap dan Kompetensi Aparatur Desa mengalami peningkatan sebesar 42,8%. Nilai positif pada koefisien menandakan bahwa kompetensi aparatur desa searah dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa.
- c. Koefisien Regresi X_2 (β_2) = 0,-063, menunjukkan Koefisien Regresi Variabel Sistem Pengendalian Internal (X_2) artinya apabila variabel independen lain memiliki nilai tetap dan Sistem pengendalian internal mengalami peningkatan sebesar -6,3%. Nilai Negatif pada koefisien menandakan bahwa Sistem pengendalian internal tidak searah dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

4.3.4 Uji Hipotesis

4.3.4.1. Uji T (Parsial)

Pengujian secara parsial (Uji Statiska T) bertujuan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu varibel independen terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikan yang digunakan adalah 5% dengan satu arah (0,05).

Nilai Ttabel untuk $n = 56-4-1 = 2,007$, dimana n = jumlah sampel dan k = jumlah variabel independen.

Tabel 4. 18**Hasil Uji T****Coefficients^a**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients Beta		
1	(Constant)	21.765	3.826		5.689	.000
	Kompetensi Aparatur Desa	.428	.114	.675	3.766	.000
	Sistem Pengendalian Internal	-.063	.051	-.223	-1.244	.219

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Sumber: Data diolah SPSS 26 tahun 2023

a. Kompetensi Aparatur Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan tabel 4.18 *output coefficients*, diketahui Thitung sebesar 3,766 dimana $Thitung > T_{tabel}$ atau $3,766 > 2,007$. Selain itu dapat dilihat bahwa tingkat sig sebesar 0,000 dimana dalam hal ini nilai sig. $< 0,05$ atau $0,000 < 0,05$ maka hal ini menjelaskan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya Kompetensi Aparatur Desa berpengaruh secara parsial terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

b. Sistem pengendalian Internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

Berdasarkan tabel 4.18 *output coefficients*, diketahui Thitung sebesar -1,893 dimana $Thitung < T_{tabel}$ atau sebesar $-1,244 < 2,007$ memiliki Thitung sebesar -1,244 yang lebih rendah dibandingkan dengan t tabel sebesar 2,007 Selain itu dapat dilihat bahwa tingkat sig sebesar 0,219 dimana dalam hal ini nilai sig. $> 0,05$ atau $0,219 > 0,05$ maka hal ini menjelaskan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak, artinya sistem pengendalian internal tidak berpengaruh secara parsial terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

Penjelasan :**a. Pengaruh Kompetensi aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa**

Berdasarkan hasil uji parsial (uji t) nilai variabel bebas Kompetensi Aparat Desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah sebesar $0,000 < 0,05$ yang berarti terdapat pengaruh signifikan antara kompetensi aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan hal tersebut maka H1 pada penelitian diterima.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Saputra, 2020) (Aziz & Prastiti, 2019) (Wardana, (2016) menyebutkan bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Menunjukkan kompetensi yang dimiliki para perangkat desa semakin tinggi dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan (Perdana, 2018) yang membuktikan bahwa kompetensi aparatur desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

b. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas pengelolaan dana desa

Berdasarkan hasil uji parsial (uji t) nilai variabel bebas sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah sebesar $0,219 > 0,05$ yang berarti tidak terdapat pengaruh positif antara sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan hal tersebut maka H2 pada penelitian ditolak,

yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Artinya yang menyebabkan hasil ini tidak positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa karena ada jawaban dari responden yang tidak setuju mengenai sistem pengendalian internal. Hal ini tidak sependapat dengan penelitian terdahulu (Amanda,dkk 2019) dimana sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pemerintah dalam mengelola alokasi dana desa, penelitian lain yang dilakukan oleh (Siska Wahyuni,2018) juga menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pemerintah dalam mengelola alokasi dana desa, dimana sistem pengendalian internal bertujuan untuk menjamin kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, menjamin keandalan laporan keuangan dan data keuangan, memfasilitasi efisiensi dan efektivitas operasioperasi pemerintah. Maka dibutuhkan sistem pengendalian intern yang baik untuk meningkatkan akuntabilitas.

4.3.4.2. Uji F (Simultan)

Uji Simultan (Uji F) pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel independen atau variabel terikat.

Tabel 4. 19
Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	169.801	2	84.901	10.156	.000 ^b
	Residual	443.056	53	8.360		
	Total	612.857	55			

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

b. Predictors: (Constant), Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Aparatur Desa

Sumber: Data diolah SPSS 26 tahun 2023

Berdasarkan tabel 4.19 diatas dapat dilihat bahwa nilai Fhitung sebesar 10,156 dengan nilai Ftabel yaitu 2,55 dimana nilai Fhitung lebih besar dari Ftabel yaitu 10,156. Selain itu juga dapat dilihat bahwa nilai sig. sebesar 0,000 dimana nilai sig. lebih kecil dari 0,05 atau $0,000 < 0,05$, maka dalam hal ini H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya Kompetensi Aparatur Desa (X1), Sistem Pengendalian Internal (X2) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y).

4.3.4.3. Uji Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien Determinasi (R²) digunakan untuk mengukur seberapa besar peran variabel bebas (Independen) yaitu Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal menjelaskan perubahan yang terjadi pada variabel terikat (Dependen). Dibawah ini adalah hasil uji koefisien determinasi dari penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 20
Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.526 ^a	.277	.250	2.89129

a. Predictors: (Constant), Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Aparatur Desa

Sumber: Data diolah SPSS 26 tahun 2023

Berdasarkan Tabel 4.20 diatas menunjukkan nilai R sebesar 0,526 dan nilai R Square sebesar 0,277 atau 27,7%. Hal ini dapat mengidentifikasi bahwa variabel Kompetensi Aparatur Desa (X1) dan Sistem Pengendalian Internal (X2) mempengaruhi variabel Akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y) sebesar 25,0% sedangkan sisanya sebesar 75,0% dipengaruhi oleh variabel lainnya.

4.4 Pembahasan

4.4.1 Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan tabel 4.18 *Output Coefficient*, variabel Kompetensi Aparatur Desa memiliki nilai t hitung sebesar 3,766 yang berarti lebih besar daripada t tabel yang sebesar 2,007 artinya H0 ditolak dan dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dan parsial antara kompetensi aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Karena kompeten atau tidaknya aparatur desa tidak akan memberikan dampak pada akuntabilitas pengelolaan dana desa (Sari, 2021). Hasil ini sejalan dengan penelitian (Hanif & I Gede et al. (2022) menunjukkan bahwa kompetensi yang dimiliki aparat desa tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. disebabkan karena

kurangnya pelatihan pengelolaan keuangan. Berdasarkan data responden penelitian ini sebanyak 56 orang yang mengisi kuesioner, para pengelola keuangan desa mempunyai jenjang pendidikan paling banyak pada tingkat SMA/K yaitu 38 orang .

Hal ini disebabkan oleh kurangnya keterampilan aparatur desa dalam penggunaan teknologi, pengetahuan yang kurang baik dalam menjalankan sistem mengenai pengelolaan dana desa dan masih minimnya pemahaman teknis yang akuntansi yang baik sehingga menyusun dan melaporkan realisasi anggaran dana desa masih kurang optimal. Tidak terlaksananya kegiatan pelatihan juga menjadi alasan kompetensi aparatur desa menjadi kurang maksimal.

Aparatur desa harus memiliki sikap kepercayaan dan nilai serta berfikir kreatif dan inovatif, mempunyai keahlian dan keterampilan yang dimiliki khusus yang berhubungan dengan kompetensi, berpengalaman dalam menguraikan berbagai tugas dan masalah, memiliki motivasi yang tinggi dalam bekerja serta mempunyai pola berfikir yang relatif konseptual dan berfikir analitis dalam kinerjanya, maka semakin jelas kemampuan yang dimiliki seseorang dapat mempengaruhi apa yang akan dikerjakannya dan nantinya diharapkan dapat berpengaruh secara signifikan terhadap pengelolaan kinerja keuangan desa.

Oleh karena itu kompetensi menjadi salah satu hal yang dapat menjadi pemecah masalah kesenjangan antara pemerintah dan juga masyarakat, dan memastikan bahwa kompetensi yang dihasilkan bisa memberikan dampak pengelolaan dengan tingkat keterampilan kompetensi yang tinggi agar masyarakat dapat memberikan kepercayaannya kepada pemerintah dengan hasil yang baik. Kompetensi aparatur desa tergolong masih lemah ketika harus mengelola dana

desa yang cukup besar, oleh sebab itu pada pemerintah desa sudah terdapat sistem yang dapat memudahkan seseorang membuat laporan menjadi akuntabel tanpa harus mempertimbangkan tingkat kompetensi (Widyatama et al., 2020).

4.4.2 Pengaruh Sistem Pengendalian internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan tabel 4.18 *Output Coefficient*, variabel Sistem Pengendalian Internal memiliki t hitung sebesar -1,244 yang lebih rendah dibandingkan dengan t tabel sebesar 2,007 maka dapat dikatakan bahwa H_0 diterima yang artinya bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara Sistem pengendalian Internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. dan sejalan dengan yang dikemukakan oleh (Aikins 2011) bahwa pengawasan pemerintah meningkatkan akuntabilitas keuangan melalui evaluasi dan perbaikan pengendalian internal, manajemen risiko dan proses tata kelola pemerintahan (Sahala Purba et al., 2022)

Hal ini sependapat dengan penelitian terdahulu (Enggar,dkk 2020) “Pengaruh kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa” menunjukkan nilai sig sistem pengendalian internal memiliki lebih dari 0,05. Hal ini dapat diartikan bahwa H_2 diterima atau sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Belum optimalnya sistem pengendalian internal dapat menyebabkan kurang optimalnya akuntabilitas pengelolaan dana desa. Belum optimalnya sistem pengendalian internal dapat disebabkan karena kurangnya jumlah tim pengendalian internal dalam lingkup pemerintahan desa. Belum optimalnya tanggungjawab para

aparatur desa dapat mempengaruhi pengendalian internal atas laporan keuangan dana desa.

Maka penyelenggaraan kegiatan dalam suatu pemerintah mulai dari perencanaan, pelaksanaan pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban harus dilaksanakan secara tertib, terkendali serta efisien dan efektif. Untuk itu dibutuhkan suatu sistem yang dapat memberi keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan pada suatu instansi pemerintah dapat mencapai tujuannya secara efisien dan efektif, melaporkan pengelolaan keuangan secara andal, mengamankan aset dan mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang – undangan. Artinya sistem pengendalian internal menyatu pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh perangkat sehingga menciptakan akuntabilitas yang baik dalam mengelola alokasi dana desa (Mualifu et al., 2019)

4.4.3 Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan hasil uji simultan dari tabel F hitung sebesar dari F tabel ($df_1=2$, $df_2=11$, $\alpha=0,05$) sebesar 2,55, diketahui nilai sig. sebesar 0,000 dimana nilai sig. lebih kecil dari 0,05 atau $0,000 < 0,05$ dan diperoleh hasil nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,277 atau 27,7% serta sisanya sebesar 75,0% dipengaruhi oleh variabel lainnya. Maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya Kompetensi Aparatur Desa (X1) dan Sistem Pengendalian Internal (X2) berpengaruh secara simultan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y).

Dengan adanya kompetensi aparatur desa yang baik akan meningkatkan aparatur desa dalam memahami tata cara pengelolaan dana desa serta mampu menerapkannya dengan baik pula, sehingga pengelolaan dana desa menjadi

semakin akuntabel. dimensi peningkatan kompetensi aparatur desa mencakup penguasaan pengetahuan, keterampilan dan wawasan yang diperoleh melalui pendidikan, latihan, belajar dan pengalaman. Sistem pengendalian internal adalah suatu cara mengawasi, mengarahkan serta mengukur sumber daya suatu lembaga dan memiliki peran yang penting. Aparat desa yang memiliki kompetensi yang tinggi akan lebih bertanggung jawab jika didukung dengan komitmen yang tinggi kepada organisasi (Jati et al., 2023).

Hal tersebut akan mendorong aparatur untuk menyusun, melaksanakan, hingga mempertanggungjawabkan program kerja yang menggunakan dana desa menjadi lebih akuntabel dan bisa dipertanggungjawabkan kepada publik. Aparatur desa dalam mewujudkan keberhasilan pengelolaan dana desa juga harus didukung dengan adanya peningkatan pada sistem keuangan desa (Siskeudes). Adanya penerapan Sistem Keuangan Desa tersebut tentunya memberikan kelebihan maupun kelemahan bagi penggunanya. Aplikasi siskeudes diterapkan guna meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa, sehingga nantinya memudahkan aparatur desa dalam mengelola keuangan desa. aplikasi ini juga bisa digunakan secara online maupun offline, dilengkapi dengan petunjuk pelaksanaan implementasi dan manual aplikasi sehingga dapat menciptakan laporan keuangan yang lebih akurat (Malahika et al., 2018)

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai variabel kompetensi aparatur desa, Sistem pengendalian internal, komitmen organisasi dan sistem keuangan desa pada desa-desa yang ada di Kecamatan Rahuning, maka dapat disimpulkan bahwa:

- a. Terdapat pengaruh secara parsial dan signifikan variabel Kompetensi Aparatur Desa (X1) terhadap Akuntabilitas Pengelolaan dana desa pada desa-desa yang ada di Kecamatan Rahuning
- b. Tidak Terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial variabel Sistem Pengendalian Internal (X2) terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pada desa-desa yang ada di Kecamatan Rahuning
- c. Terdapat pengaruh Kompetensi Aparatur Desa (X1) dan Sistem Pengendalian Internal (X2) secara simultan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pada desa-desa yang ada di Kecamatan Rahuning

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, maka terdapat beberapa saran yang diharapkan akan berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan yaitu:

- a. Bagi Desa

Aparatur desa yang ada di Kecamatan Rahuning diharapkan agar lebih terampil dan cekatan dalam mengelola keuangan desa serta pendamping desa

diharapkan dapat meningkatkan kompetensinya sehingga dalam mengelola dana desa . serta giat dalam mengikuti seminar atau BIMTEK yang dilakukan setiap tahun oleh pihak-pihak yang terkait yang dimulai dari penyusunan data, merencanakan anggaran, pengorganisasian, pelaksanaan sampai dengan pengawasan supaya tidak terjadi penyelewengan dan korupsi yang dilakukan dalam pengelolaan keuangan desa

b. Bagi Peneliti

Selanjutnya Jika tertarik untuk melakukan penelitian yang sama, diharapkan untuk lebih mengembangkan/menambahkan variabel lain yang akan diteliti sebagai variabel pendukung yang dapat mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dan juga menambah indikator maupun daftar pertanyaan yang akan digunakan agar hasil penelitian yang diperoleh akan semakin baik serta diharapkan pula dapat memperluas responden dan ruang lingkup penelitian agar lebih dapat digeneralisasikan.

5.3 Keterbatasan

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah:

- a. Hasil penelitian ini hanya dapat dijadikan analisis pada objek penelitian di Kecamatan Rahuning. Sehingga memungkinkan terjadinya perbedaan hasil dan kesimpulan apabila dillakukan pada objek yang lain.
- b. Penelitian ini hanya meneliti pada subjek perangkat desa yang berada di Kecamatan Rahuning sehingga memungkinkan terjadinya perbedaan apabila meneliti pada populasi yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilya, K. R., & Fitria, A. (2020). Pengaruh Kompetensi, Komitmen Organisasi, Transparansi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(3), 1–20.
- Atiningsih, S., & Ningtyas, A. C. (2019). Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa, Partisipasi Masyarakat, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Aparatur Pemerintah Desa Se-Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali). *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi Terapan (JIMAT)*, 10(1), 2015–2019.
- Hanum, Z., & Hasibuan, J. S. (2015). Analisis Sistem Pengendalian Intern Penyitaan Aset Wajib Pajak Pada KPP Pratama Medan Polonia). *Snema, c.* [http://fe.unp.ac.id/sites/default/files/unggahan/13%2C Zulia Hanum%2C Jasman Saripuddin Hasibuan %28hal 462-471%29_0.pdf](http://fe.unp.ac.id/sites/default/files/unggahan/13%2C%20Zulia%20Hanum%20Jasman%20Saripuddin%20Hasibuan%20hal%20462-471%29_0.pdf)
- Hanum, Z., Hafisah, & Ritonga, P. (2021). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kinerja Kampus Islam Swasta di Kota Medan. *Semiar Nasional Teknologi Edukasi Dan Humaniora*, 811–816.
- Jati, I. K., Dwirandra, A. A. N. B., Widhiyani, N. L. S., & Kresnandra, A. A. N. A. (2023). Kompetensi Aparatur Desa dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dengan Partisipasi Masyarakat dan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Moderasi. *E-Jurnal Akuntansi*, 33(2), 498. <https://doi.org/10.24843/eja.2023.v33.i02.p15>
- Manik, L. F., Sari, E. N., & Irfan. (2020). Pengaruh Kompetensi, Akuntabilitas Terhadap Penyusunan Anggaran Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating Pada Sma Swasta Bagian Medan Utara. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 20(1), 100–105.
- Masruhin, A., & Kaukab, M. E. (2019). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, Partisipasi Masyarakat, Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Perangkat Desa Di Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo). *Journal of Economic, Business and Engineering*, 1(1), 118–130.
- Mualifu, Guspul, A., & Hermawan. (2019). Pengaruh Transparansi, Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, dan Komitmen Organisasi Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (Studi Empiris pada Seluruh Desa di Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga). *Journal of Economic, Business and Engineering*, 1(1), 49–59.

- Nurjaya, N., Affandi, A., Ilham, D., Jasmani, J., & Sunarsi, D. (2021). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Kemampuan Pemanfaatan Teknologi Terhadap Kinerja Aparatur Desa Pada Kantor Kepala Desa Di Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta. *JENIUS (Jurnal Ilmiah Manajemen Sumber Daya Manusia)*, 4(3), 332. <https://doi.org/10.32493/jjsdm.v4i3.10460>
- Oktavia, A., Bustami, E., & Megawati. (2020). Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD)(Studi Pada *JAN Maha*, 3(11), 118–132. http://repository.umpalopo.ac.id/219/%0Ahttp://repository.umpalopo.ac.id/219/3/BAB_201630087.pdf
- Pahlawan, E. W., Wijayanti, A., & Suhendro, S. (2020). Pengaruh kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Indonesia Accounting Journal*, 2(2), 162. <https://doi.org/10.32400/iaj.29261>
- Puspa, D. F., & Prasetyo, R. A. (2020). Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Sistem Pengendalian Internal, Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 20(2), 281–298. <https://doi.org/10.25105/mraai.v20i2.7894>
- Sahala Purba, Rintan Saragih, & Tika Meisiska Br Sembiring. (2022). Pengaruh Kompetensi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa. *AKUA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1), 122–129. <https://doi.org/10.54259/akua.v1i1.140>
- Sweetenia, A. M., Caesari, E. P. A., Aprillia, A. F., & Purwantini, A. H. (2019). Pengaruh Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, Dan Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa. *Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi*, 17(1), 44–56. <https://doi.org/10.31603/bisnisekonomi.v17i1.2752>
- Tarigan, J. I., & Sari, E. N. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Kompetensi SDM terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara. *Kajian Akuntansi*, 22(2), 175–205. https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/kajian_akuntansi/article/view/8211
- Wahyuni, N., Kamilia, I., & Afroh, F. (2021). Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris di Kecamatan Beuki Kabupaten Situbondo). *Business and Economics Conference in Utilization of Modern Technology*, 126–133.

<https://journal.unimma.ac.id>

Zulkifl, Z., Sandrayati, S., & Ariani, N. (2021). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal Dan Komitmen Organisasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim. *JEMBATAN (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis, Auditing, Dan Akuntansi)*, 6(1), 26–38. <https://doi.org/10.54077/jembatan.v6i1.55>

Sugyono, Prof. Dr. 2013, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Jl. Gegerkalong Hilir No.84 Bandung, *Alfabeta, CV*.

Prayogi, M.A., Lesmana, M.T., & Siregar, L.H. (2019). "Pengaruh Kompetensi dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai." *Prosiding Festival Riset Ilmiah Manajemen & Akuntansi FRIMA-2019*.

LAMPIRAN



PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN

No. Agenda: /JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/04/01/2023

Kepada Yth.
Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di Medan

Medan, 04/01/2023

Dengan hormat.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : NURSALMAH BR SIAGIAN
NPM : 1905170080
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

- Identifikasi Masalah : 1. kurangnya sosialisasi pemerintah desa pada masyarakat dan transparansi tentang dana desa
- Rencana Judul : 1. 1. Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa
2. 2. Akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan anggaran pendapatan desa dan belanja desa (APBDes)
3. 3. Analisis kinerja aparatur pemerintah desa dalam akuntabilitas dana desa

Objek/Lokasi Penelitian : DESA MEKAR SARI KEC. PULAU RAKYAT KAB. ASAHAN

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya
Pemohon

(NURSALMAH BR SIAGIAN)



PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN

Nomor Agenda: /JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/04/01/2023

Nama Mahasiswa : NURSALMAH BR SIAGIAN
NPM : 1905170080
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Tanggal Pengajuan Judul : 04/01/2023
Nama Dosen pembimbing^{*)} : Novi Fadhila, SE., MM (13 Januari 2023)

Judul Disetujui^{**)}

PENGARUH KOMPETENSI APARAT DESA DAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP AKUNTABILITAS
PENGELOMBAAN PANA DESA PADA DESA-DESA
KEC. RAHUMUH G.

Disahkan oleh:
Ketua Program Studi Akuntansi

(Dr. Zulia Hanum, S.E., M.Si.)

Medan, 06. Maret 2023

Dosen Pembimbing

(NOVI FADHILA, SE., MM)

Keterangan

*) Ditau oleh Pimpinan Program Studi

**) Ditau oleh Dosen Pembimbing

setelah disetujui oleh Prodi dan Dosen Pembimbing, akan foto dan upload file terbitan ke-2 ini pada form online "Upload pengajuan judul Skripsi"



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6621003
<http://feb.umsu.ac.id> feb@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Nomor : 674/IL.3-AU/UMSU-05/F/2023
Lampiran : -
Perihal : Izin Riset Pendahuluan
Medan, 15 Sya'ban 1444 H
07 Maret 2023 M

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Pimpinan
Kantor Kecamatan Rahuning Kabupaten Asahan
Jln. Perintis Kemerdekaan No. 61
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, schubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu sudi kiranya untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di Perusahaan / Instansi yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1)

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Nursalmah Br Siagian
Npm : 1905170080
Program Studi : Akuntansi
Semester : VIII (Delapan)
Judul Skripsi : Pengaruh Kompetensi Aparat Desa Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Desa-Desa Kecamatan Rahuning

Demikianlah surat kami ini, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Tembusan :
1. Peringgal

Dekan

Dr. H. Januri, SE., MM., M.Si
NIDN : 0109086502





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/10/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://feb.umsu.ac.id> feb@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING
PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA**

NOMOR : 677/TGS/IL3-AU/UMSU-05/F/2023

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan
Persetujuan permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :
Program Studi : Akuntansi
Pada Tanggal : 24 Februari 2023

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : Nursalmah Br Siagian
N P M : 1905170080
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Akuntansi
Judul Proposal / Skripsi : Pengaruh Kompetensi Aparat Desa Dan Sistem Pengendalian
Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada
Desa-Desa Kecamatan Rahuning

Dosen Pembimbing : **Novi Fadhila, SE., MM**

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan setelah pelaksanaan Seminar Proposal ditandai dengan Surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi
3. **Proyek Proposal / Skripsi dinyatakan " BATAL " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : 07 Maret 2024**
4. Revisi Judul

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 15 Sya'ban 1444 H
07 Maret 2023 M

Dekan

Dwi H. Januri, SE., MM., M.Si
NIDN : 0109086502



Tembusan :
1. Pertinggal





**PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN
KECAMATAN RAHUNING**

JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN NO. 61 TELP: -
E-MAIL. kecamatanrahuning@gmail.com RAHUNING – KODE POS. 21274

Rahuning, 05 April 2023

nomor : 600/2023
tipe : Biasa
sifat : -
tujuan : **Memberi Izin Riset**

Kepada Yth :
Dekan Universitas Muhammadiyah
Sumatera Utara

Di -
Tempat

1. Menindaklanjuti surat No. 674/II.3-AU/UMSU-05/F/2023 tanggal 07 Maret 2023 Perihal Izin Riset Pendahuluan.
2. Berkenaan dengan hal tersebut diatas, bersama ini kami terima permohonan Saudari untuk melaksanakan riset atas nama :

Nama : Nursalmah Br Siagian
NPM : 1905170080
Program Studi : Akuntansi
Semester : VIII (Delapan)
Judul : Pengaruh Kompetensi Aparat Desa dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Desa-Desa Kecamatan Rahuning.
3. Demikian kami sampaikan atas kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.



MOHAMMAD YASIR, SH
PENATA TK. I
NIP. 19751117 199602 1 001



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3, Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

BERITA ACARA PEMBIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Nursalmah Br Siagian
NPM : 1905170080
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Dosen Pembimbing : Novi Fadhila, SE., M.M
Judul Penelitian : Pengaruh Kompetensi Aparat Desa dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pada Desa-Desa di Kec. Rahuning

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	- Pada latar belakang, hindari menggunakan kata-kata yang memunculkan kebingungan. - formulasi harus diulas dan informasi harus ada di awal bab. - rumusan masalah harus lebih ada di awal bab.	14 & 16 Maret 2023	
Bab 2	- gunakan referensi yang terbaru. - sesuaikan hipotesis dengan kerangka berpikir.	20 & 21 Maret 2023.	
Bab 3	- Sempurnakan definisi operasional. - Sebutkan alamat tempat penelitian. - munculkan populasi yang diteliti.	21, 25 Maret 2023.	
Daftar Pustaka	- gunakan mendefinisikan kutipan & daftar pustaka.	30 Maret 2023.	
Instrumen Pengumpulan Data Penelitian	- gunakan kuesioner yang sudah teruji.	16 Maret 2023	
Persetujuan Seminar Proposal	- selesai bimbingan	11 April 2023.	

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi

(Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, SE, M.Si)

Medan, April 2023
Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing

(Novi Fadhila, SE., M.M)



BERITA ACARA SEMINAR PROGRAM STUDI AKUNTANSI

Pada hari ini *Rabu, 24 Mei 2023* telah diselenggarakan seminar Program Studi Akuntansi menerangkan bahwa :

nama : *Nursalmah Br Siagian*
 PM. : *1905170080*
 tempat / Tgl.Lahir : *Rahuning I, 18 Mei 2001*
 alamat Rumah : *Dusun I Rahuning I*
 judul Proposal : *Pengaruh Kompetensi Aparat Desa Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelola Dana Desa Pada Desa-Desa Di Kec. Rahuning*

Disetujui / tidak disetujui *)

Item	Komentar
judul	
ab I	<i>Pada bab I terdapat beberapa masalah</i>
ab II	<i>Pada bab II terdapat beberapa masalah</i>
ab III	<i>Pada bab III terdapat beberapa masalah</i>
lainnya	<i>Terdapat beberapa masalah</i>
kesimpulan	<input checked="" type="checkbox"/> Lulus <input type="checkbox"/> Tidak Lulus

Medan, 24 Mei 2023

TIM SEMINAR

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si

Sekretaris

Riva Ubar Harahap, SE., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembimbing

Novi Fadhila, SE., MM

Pembanding

Henny Zurika Lubis, SE., M.Si



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext: 304 Medan 220238



PENGESAHAN PROPOSAL

berdasarkan hasil Seminar proposal Program Studi Akuntansi yang diselenggarakan pada hari *Rabu, 24 Mei 2023* menerangkan bahwa:

Nama : Nursalmah Br Siagian
NPM : 1905170080
Tempat / Tgl.Lahir : Rahuning I. 18 Mei 2001
Alamat Rumah : Dusun I Rahuning I
Judul Proposal : Pengaruh Kompetensi Aparat Desa Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelola Dana Desa Pada Desa-Desa Di Kec. Rahuning

Proposal dinyatakan layak dan memenuhi Syarat untuk menulis Skripsi dengan pembimbing : *Novi Fadhila, SE., MM*

Medan, 24 Mei 2023

TIM SEMINAR

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si

Sekretaris

Riva Ubar Harahap, SE., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembimbing

Novi Fadhila, SE., MM

Pembanding

Henny Zurika Lubis, SE., M.Si

Diketahui / Disetujui
a.n.Dekan
Wakil Dekan I



Assoc. Prof. Dr. Ayde Gunawan, SE, M.Si
NIDN. 0105087601



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/IBAN-PT/Akred/PT/RI/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Sasri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://feb.umsu.ac.id> feb@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Nomor : 1742/IL3-AU/UMSU-05/F/2023
Lamp : -
Hal : Menyelesaikan Riset

Medan, 25 Dzulhijjah 1444 H
13 Juli 2023 M

Kepada Yth.
Bapak/ Ibu Pimpinan
Kantor Kecamatan Rahuning Kabupaten Asahan
Jln. Perintis Kemerdekaan No 61
Di-
Tempat

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa/i kami akan menyelesaikan studinya, mohon kesediaan bapak/ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di perusahaan/instansi yang bapak/ibu pimpin, guna untuk *melanjutkan Penyusunan / Penulisan Skripsi pada Bab IV - V*, dan setelah itu mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan surat keterangan telah selesai riset dari perusahaan yang bapak/ibu pimpin, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian program studi **Strata Satu (S1)** di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Nursalmah Br Siagian
N P M : 1905170080
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Pengaruh Kompetensi Aparat Desa Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Desa-Desa Kecamatan Rahuning

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, Kami ucapkan terima kasih

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Tembusan :
1. Pertinggal

Dekan

Dr. H. Januri, SE., MM., M.Si
NIDN : 0109086502





PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN
KECAMATAN RAHUNING

Jalan Perintis Kemerdekaan No. 61 Telp; -
E-mail kecamatanrahuning@gmail.com RAHUNING Kode Pos. 21274

SURAT KETERANGAN SELESAI RISET

Nomor : 19 /RH /II /2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mohammad Yasir, SH
Jabatan : Camat Rahuning
NIP : 19751117 199602 1 001

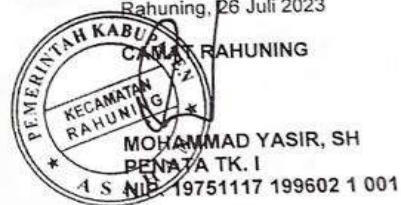
Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas :

Nama : Nursalmah Br Siagian
NPM : 1905170080
Program Studi : Akuntansi
Semester : VIII (Delapan)
Universtias : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Telah selesai melakukan riset pada Desa di Kecamatan Rahuning Kabupaten Asahan mulai April sampai dengan Juli 2023 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "*Pengaruh Kompetensi Aparat Desa dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Desa-Desa Kecamatan Rahuning*".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Rahuning, 26 Juli 2023



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Nursalmah Br Siagian
NPM : 1905170080
Tempat/Tanggal Lahir : Rahuning I, 18-05-2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Dusun I Rahuning I Asahan
Anak Ke : 5 dari 5 bersaudara
No. Telepon : 0812-6267-6932
Email : nursalmahsiagian98@gmail.com

2. Data Orangtua

Nama Ayah : Hamdan Siagian
Pekerjaan : Petani
Nama Ibu : Rusmawati
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Dusun I Rahuning I Asahan

3. Pendidikan Formal

Sekolah Dasar : SD Negeri 010121 Sei Piring
Sekolah Menengah Pertama : SMP N 3 Pulau Rakyat
Sekolah Menengah Atas : SMAS Swadaya Pulau Rakyat
Perguruan Tinggi : Kuliah pada Fakultas Ekonomi
bisnis Program studi Akuntansi
Universitas Muhammadiyah
Sumatera Utara